



LAPORAN TAHUNAN 2025



KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN
STASIUN PSDKP BELAWAN

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat rahmat dan karunia-Nya “**Laporan Tahunan Stasiun Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Belawan TA. 2025**” dapat kami selesaikan.

Laporan Tahunan ini disusun dalam rangka wujud pertanggungjawaban atas pelaksanaan program dan kegiatan sesuai dengan rencana kerja yang telah disusun dalam kurun waktu tahun 2025. Selain itu, laporan ini merupakan gambaran hasil kinerja Stasiun Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Belawan tahun 2025.

Kami berharap, Laporan Tahunan ini menjadi tolak ukur peningkatan kinerja bagi seluruh staf Stasiun Pengawasan SDKP Belawan dan semua pihak yang terkait, sehingga semua dapat berjalan secara wajar dan lancar dengan hasil sesuai yang diharapkan. Semoga di masa datang motivasi yang telah tumbuh dan kerjasama yang telah dibangun di Stasiun Pengawasan SDKP Belawan yang lebih baik, dapat terus ditingkatkan.

Pada kesempatan ini, kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam meningkatkan pencapaian kinerja Stasiun Pengawasan SDKP Belawan.

Demikian kami sampaikan, semoga laporan ini dapat memberikan informasi kepada pihak terkait.

Belawan, 5 Februari 2025

**Kepala Stasiun Pengawasan Sumber Daya
Kelautan dan Perikanan Belawan**



M. Syamsu Rokhman, S.Pi, M.H

NIP. 19830730 200801 1 003

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GAMBAR.....	v
DAFTAR LAMPIRAN	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Maksud dan Tujuan	2
1.3 Lingkup Pelaporan	2
BAB II UPT & SATUAN PENGAWASAN SDKP BELAWAN.....	4
2.1 Struktur Organisasi	4
2.2 Rencana Strategis	6
2.3 Tugas dan Fungsi	7
2.4 Tujuan	8
2.5 Wilayah Kerja.....	8
BAB III HASIL PELAKSANAAN KEGIATAN.....	10
3.1 Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya	10
3.2 Peningkatan Operasional dan Operasi Armada.....	33
3.3 Peningkatan Operasional Pengawasan Sumber Daya Perikanan	44
3.4 Peningkatan Operasional Pengawasan Sumber Daya Kelautan.....	53
3.5 Penyelesaian Tindak Pidana Kelautan Dan Perikanan.....	58
BAB IV PERMASALAHAN DAN STRATEGI PEMECAHAN.....	59
4.1 Permasalahan.....	59
4.2 Strategi Pemecahan.....	62
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	65
5.1 Kesimpulan	65
5.2 Saran.....	66
BAB VI PENUTUP	67
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Wilker Pengawasan SDKP lingkup Stasiun Pengawasan SDKP	6
Tabel 2. Persuratan Lingkup Kerja Stasiun Pengawasan SDKP Belawan	10
Tabel 3. Rincian Mutasi Persediaan di Stasiun PSDKP Belawan KKP Tahunan T.A 2025, Per 31 Desember 2025	11
Tabel 4. Rincian Mutasi Gedung dan Bangunan Pada Stasiun PSDKP Belawan Per 31 Desember 2025.....	13
Tabel 5. Nilai BMN Pada Stasiun PSDKP Belawan Per 31 Desember 2025	15
Tabel 6. Perkembangan Nilai BMN Pada Stasiun PSDKP Belawan	15
Tabel 7. Ringkasan Nilai Penetapan Status Penggunaan BMN pada Stasiun PSDKP Belawan Per 31 Desember 2025.....	16
Tabel 8. Ringkasan Pengelolaan BMN Pada Stasiun PSDKP Belawan per 31 Desember 2025	16
Tabel 9. Rekap Revisi DIPA TA 2025 Stasiun PSDKP Belawan.....	17
Tabel 10. Realisasi Anggaran Per Program/Kegiatan TA.2025.....	19
Tabel 11. Komposisi Pegawai Lingkup Stasiun Pengawasan SDKP Belawan berdasarkan Status Pegawai	21
Tabel 12. Komposisi Pegawai Stasiun Pengawasan SDKP Belawan Berdasarkan Satuan Pengawasan Tahun 2025.....	22
Tabel 13. Komposisi PNS Pengawasan SDKP lingkup Stasiun Pengawasan SDKP Belawan Berdasarkan Tingkat Golongan Tahun 2025	23
Tabel 14. Komposisi Pegawai PNS, PPPK, PPPK Paruh Waktu dan PJLP Stasiun Pengawasan SDKP Belawan Berdasarkan Tingkat Pendidikan	24
Tabel 15. Jabatan Fungsional yang ada di Stasiun Pengawasan SDKP Belawan	24
Tabel 16. Pegawai yang mendapatkan kenaikan pangkat periode April 2025	25
Tabel 17. Pegawai yang mendapatkan kenaikan pangkat periode Agustus 2025.....	25
Tabel 18. Pegawai yang mendapatkan kenaikan pangkat periode Oktober ..	25
Tabel 19. Ketua Tim Kerja.....	26
Tabel 20. Calon Pegawai Negeri Sipil Tahun 2025	26
Tabel 21. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Tahun 2025	27
Tabel 22. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Paruh Waktu Tahun 2025.....	27

Tabel 23. Kenaikan Gaji Berkala Pegawai Tahun 2025	28
Tabel 24. Tenaga PJLP Tahun 2025	31
Tabel 25. Pelatihan, Diklat, Bimbingan Teknis Pegawai TA. 2025	32
Tabel 26. Sertifikasi Kompetensi dan Ujian Dinas Pegawai TA. 2025.....	33
Tabel 27. Pencapaian Kegiatan Peningkatan Operasional Sumber Daya Kelautan dan Perikanan dan Operasi Armada	34
Tabel 28. Kapal Pengawas di Lingkup Stasiun Pengawasan SDKP Belawan....	38
Tabel 29. Kapal Perikanan yang telah Diperiksa oleh Kapal Pengawas Lingkup Kerja Stasiun Pengawasan SDKP Belawan tahun 2025	42
Tabel 30. Rekapitulasi HPK lingkup Stasiun Pengawasan SDKP Belawan	45
Tabel 31. Kapal perikanan laik operasi lingkup Stasiun Pengawasan SDKP Belawan	46
Tabel 32. Unit usaha budidaya yang diawasi Lingkup Kerja Stasiun Pengawasan SDKP Belawan Tahun 2025	48
Tabel 33. Unit usaha objek pengawasan distribusi	51
Tabel 34. Unit usaha objek pengawasan Unit Pengolahan Ikan.....	52
Tabel 35. Unit Usaha Objek Pengawasan Jenis Ikan Dilindungi	52
Tabel 36. Penyidikan yang Dilakukan Stasiun Pengawasan SDKP Belawan Tahun 2025	58

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Diagram Struktur Organisasi Stasiun Pengawasan SDKP Belawan ..	4
Gambar 2. Sebaran Satwas Lingkup Stasiun PSDKP Belawan	6
Gambar 3. Wilayah Kerja Stasiun Pengawasan SDKP Belawan.....	9
Gambar 4. Wilayah Pengelolaan Perikanan RI	9
Gambar 5. Realisasi Anggaran Per Program/Kegiatan TA.2025.....	20
Gambar 6. Komposisi Pegawai yang tersebar di Satwas SDKP Lingkup Stasiun Pengawasan SDKP Belawan	22
Gambar 7. Pembuatan Instalasi Listrik Darat	36
Gambar 8. Pembuatan Dermaga Darurat Kapal Pengawas	37
Gambar 9. Penggantian Lifecraft KP. Hiu 01	39
Gambar 10. Perawatan Rutin KP. Speedboat Napoleon 028	40
Gambar 11. Penggantian Overflow dan sensor BBM KP. Speedboat Napoleon 028	41
Gambar 12. Docking KP. Speedboat Napoleon 028	41
Gambar 13. Dokumentasi Pemeriksaan Kapal di Laut (Patroli Speed Boat)	44
Gambar 14. Rekapitulasi HPK di Lingkup Stasiun Pengawasan SDKP Belawan Tahun 2025	45
Gambar 15. Dokumentasi Pengawasan Kapal Perikanan Oleh Pengawas Perikanan.....	47
Gambar 16. Dokumentasi Pengawasan Unit Usaha Budidaya Oleh Pengawas Perikanan.....	48
Gambar 17. Dokumentasi Pengawasan Distribusi Hasil Perikanan Oleh Pengawas Perikanan	50
Gambar 18. Dokumentasi Pengawasan Unit Pengolahan Ikan Oleh Pengawas Perikanan.....	51
Gambar 19. Dokumentasi Pengawasan Jenis Ikan Dilindungi	52
Gambar 20. Pengawasan PRL.....	55
Gambar 21. Pengawasan Produk/Jasa Kelautan (Pemanfaatan ALSE)	56
Gambar 22. Pengawasan Kegiatan Pencemaran.....	57

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran

1. Struktur Organisasi Stasiun Pengawasan SDKP Belawan Tahun 2025
2. Persuratan Lingkup Kerja Stasiun Pengawasan SDKP Belawan
3. Komposisi Pegawai T.A. 2025
4. Daftar Nama Pegawai Lingkup Stasiun Pengawasan SDKP Belawan
5. Kenaikan Gaji Berkala Tahun 2025
6. Daftar Nama PPNS Lingkup Stasiun PSDKP Belawan
7. Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Perikanan Tahun 2025
8. Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Kelautan Tahun 2025
9. Rekapitulasi Kapal yang diperiksa KP Hiu 01, 08, 16, dan Napoleon 028

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) terus melaksanakan pengawasan untuk mewujudkan Indonesia bebas *illegal fishing* dan kegiatan yang merusak sumber daya kelautan dan perikanan, yang pada akhirnya mendukung kelestarian sumber daya kelautan dan perikanan, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Landasan konstitusional yang menjadi dasar dalam melakukan kegiatan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan semakin kuat, hal tersebut didasari atas lahirnya beberapa regulasi yang menjadi acuan (*guidance*) dalam melaksanakan fungsi pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan, landasan konstitusional tersebut antara lain Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas UU No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan serta amanat dari Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.

Untuk mendukung pelaksanaan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan, pemerintah melalui Unit Pelaksana Teknis salah satunya yaitu Stasiun Pengawasan SDKP Belawan serta beberapa Satuan Pengawasan dan Wilker yang ada di bawahnya melaksanakan kegiatan untuk menjalankan amanah Undang-Undang tersebut. Stasiun Pengawasan SDKP Belawan merupakan lembaga pemerintah setingkat eselon IV dan dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya, Stasiun Pengawasan SDKP Belawan bertanggung jawab langsung kepada Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia. Hal

ini sesuai dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor : PER.69/MEN/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan. Stasiun Pengawasan SDKP Belawan mempunyai tugas dan fungsi melaksanakan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Untuk dapat melihat kinerja yang telah dilakukan, maka Stasiun Pengawasan SDKP Belawan menyusun laporan tahunan yang berisikan paparan tingkat capaian dan evaluasi terhadap kegiatan yang sudah dilaksanakan, sehingga dapat menggambarkan kondisi terkini apakah Stasiun Pengawasan SDKP Belawan telah melaksanakan prinsip-prinsip untuk menciptakan sistem pemerintahan yang baik dalam rangka mengoptimalkan pelaksanaan program/kegiatan lingkup Direktorat Jenderal Pengawasan SDKP pada tahun 2025.

1.2 Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan laporan tahunan tahun 2025 yaitu untuk melaporkan capaian program/kegiatan selama 1 (satu) tahun dan melakukan evaluasi atas program/kegiatan yang telah dilaksanakan apakah sudah sesuai atau belum dengan target kinerja yang sudah ditetapkan.

Tujuan dari penyusunan laporan ini yaitu sebagai proses atau cara untuk pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan selama 1 (satu) tahun dan merencanakan kegiatan/program tahun berikutnya, dalam rangka mengoptimalkan pelaksanaan program/kegiatan lingkup Stasiun Pengawasan SDKP Belawan secara periodik.

1.3 Lingkup Pelaporan

Lingkup pelaporan dibuat dari laporan evaluasi dan kinerja Stasiun Pengawasan SDKP Belawan berserta 3 (tiga) Satuan

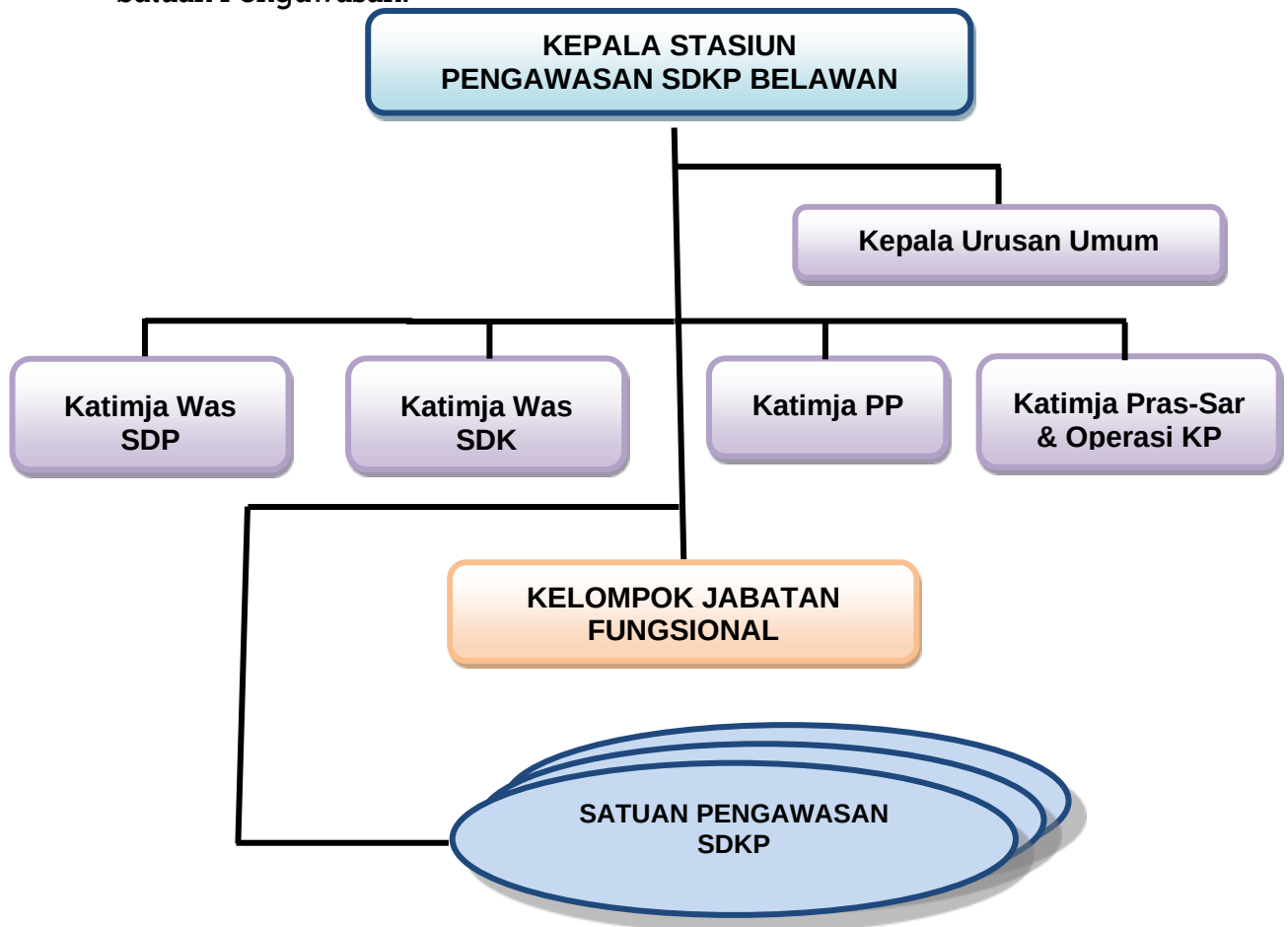
Pengawasan SDKP lingkup Stasiun Pengawasan SDKP Belawan tahun 2025, meliputi :

1. Laporan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya;
2. Peningkatan Operasional Pemantauan dan Operasi Armada;
3. Peningkatan Operasional Pengawasan Sumber Daya Perikanan;
4. Peningkatan Operasional Pengawasan Sumber Daya Kelautan;
5. Penyelesaian Penanganan Pelanggaran bidang Kelautan dan Perikanan;

BAB II UPT & SATUAN PENGAWASAN SDKP BELAWAN

2.1 Struktur Organisasi

Sesuai Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.69/MEN/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, maka struktur Organisasi Stasiun Pengawasan SDKP Belawan terdiri dari Kepala Stasiun yang Menjabat Eselon IV dan langsung membawahi Kepala Urusan Umum, Pelaksana Koordinasi Operasional Pengawasan dan Penanganan Pelanggaran, Pelaksana Koordinasi Sarana dan Prasarana, Kelompok Jabatan Fungsional, dan Koordinator Satuan Pengawasan.



Gambar 1. Diagram Struktur Organisasi Stasiun Pengawasan SDKP Belawan

Mulai tanggal 5 Oktober 2023 berdasarkan Surat Tugas Kepala Stasiun PSDKP Belawan Nomor B.2340/PSDKPSta.2/KP.440/X/2023, Pelaksana Koordinator dihapus dan diganti Ketua Tim Kerja. Terdapat 5 tim kerja yang membantu Kepala Stasiun PSDKP Belawan, yaitu :

1. Ketua Tim Kerja Intelijen dan Pengawasan Sumber Daya Perikanan, dengan Ketua Tim Kerja : Tupa Prosasdi Sitanggang, S.Pi.
2. Ketua Tim Kerja Intelijen dan Pengawasan Sumber Daya Kelautan, dengan Ketua Tim Kerja : Muhammad Iqbal, S.Pi.
3. Ketua Tim Kerja Penanganan Pelanggaran, dengan Ketua Tim Kerja : Josia Suarta Sembiring, SH.
4. Ketua Tim Kerja Prasarana, Sarana dan Operasi Kapal Pengawas, dengan Ketua Tim Kerja : Jefri Silalahi, S.Pi.
5. Ketua Tim Kerja Dukungan Manajerial merangkap Kaur Umum, dengan Ketua Tim Kerja : Mujtaba Umar Nasution, SE.

Dalam melaksanakan operasional pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan Stasiun Pengawasan SDKP Belawan membawahi 3 (tiga) Satuan Pengawasan dan 9 (sembilan) Wilker Pengawasan yang sudah aktif melaksanakan kegiatan pengawasan. Satuan Pengawasan terdiri dari :

1. Satuan Pengawasan SDKP Langsa (Aceh)
2. Satuan Pengawasan SDKP Asahan (Sumatera Utara)
3. Satuan Pengawasan SDKP Rokan Hilir (Riau)

Wilayah Kerja Pengawasan SDKP yang aktif Lingkup Stasiun Pengawasan SDKP Belawan yaitu terdiri dari :

Tabel 1. Wilker Pengawasan SDKP lingkup Stasiun Pengawasan SDKP

No	Nama Wilker
1	Wilker PSDKP Idi
2	Wilker PSDKP Lhokseumawe
3	Wilker PSDKP Biureun
4	Wilker PSDKP Sigli
5	Wilker PSDKP Batubara
6	Wilker PSDKP Panipahan
7	Wilker PSDKP Kepulauan Meranti
8	Wilker PSDKP Dumai
9	Wilker PSDKP Indragiri Hilir



Gambar 2. Sebaran Satwas Lingkup Stasiun PSDKP Belawan

2.2 Rencana Strategis

Rencana Strategis (Renstra) Ditjen. PSDKP 2025-2029 merupakan perencanaan jangka menengah yang berisi tentang gambaran sasaran atau kondisi hasil yang akan dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun beserta strategi yang akan dilakukan untuk mencapai sasaran sesuai tugas dan fungsi yang diamanatkan. Renstra tersebut disusun selaras dengan arah kebijakan strategis nasional bidang kelautan dan perikanan 2025-2029 sebagaimana tertuang dalam arah kebijakan KKP 2025-2029.

Secara ringkas arah kebijakan Ditjen. PSDKP tahun 2025-2029 untuk mendukung Sasaran Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, diuraikan sebagai berikut:

1. Pengembangan SDM Aparatur Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang berkualitas dan berdaya saing;
2. Peningkatan kapasitas sarana, prasarana dan kelembagaan pengawasan SDKP;
3. Penguatan sinergi dengan penegak hukum di laut (TNI AL, POLRI, Bakamla);
4. Peningkatan komunikasi dengan stakeholder dan pelaku usaha kelautan dan perikanan;
5. Peningkatan kesadartahuan dan partisipasi masyarakat dalam pengawasan SDKP.

2.3 Tugas dan Fungsi

Sesuai dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor: PER.2/MEN/2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan, Stasiun Pengawasan SDKP Belawan memiliki tugas melaksanakan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam melaksanakan tugas tersebut Stasiun Pengawasan SDKP Belawan menyelenggarakan fungsi :

1. Penyusunan rencana, program dan evaluasi dibidang Pengawasan SDKP;
2. Pelaksanaan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan;
3. Pelaksanaan pembinaan kelompok masyarakat pengawas (Pokmaswas);
4. Pelaksanaan dan evaluasi penanganan pelanggaran sumber daya kelautan dan perikanan;
5. Pelaksanaan operasional dan penyiapan logistik kegiatan pengawasan SDKP;

6. Pelaksanaan pemeliharaan sarana dan prasarana pengawasan;
7. Pelaksanaan perencanaan dan pengembangan pengawasan kapal pengawas;
8. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga.

2.4 Tujuan

Untuk mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan maka Stasiun Pengawasan SDKP Belawan menetapkan tujuan yang akan dicapai, yaitu :

1. Terwujudnya kepatuhan (*compliance*) terhadap peraturan perundang-undangan pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan;
2. Terlindunginya sumber daya kelautan dan perikanan dari kegiatan yang merusak sumber daya kelautan dan perikanan;
3. Terlaksananya tata kelola pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan yang efektif.

2.5 Wilayah Kerja

Wilayah kerja yang menjadi kewenangan Stasiun Pengawasan SDKP Belawan, merupakan daerah *fishing ground* yang memiliki potensi sumber daya kelautan dan perikanan yang melimpah dengan berbagai keragaman hayati dan non hayati. Selain melaksanakan pengawasan di bidang penangkapan ikan juga menerima kapal yang ditangkap oleh kapal pengawas perikanan yang di kawal ke Stasiun Pengawasan SDKP Belawan dari perairan ZEEI Selat Malaka serta perairan teritorial yang tersebar di Satuan Pengawasan lingkup Stasiun Pengawasan SDKP Belawan.

Sebagai gambaran yang menunjukkan wilayah kerja Stasiun Pengawasan SDKP Belawan, ditampilkan peta sebaran satuan pengawasan lingkup Stasiun Pengawasan SDKP Belawan mulai dari Utara Pulau Sumatera. Ditunjukkan pula mengenai sebaran Wilayah

Pengelolaan Perikanan (WPP) yang tersebar di wilayah kerja Stasiun Pengawasan SDKP Belawan yaitu WPP 571 mencakup Perairan Selat Malaka.



Gambar 3. Wilayah Kerja Stasiun Pengawasan SDKP Belawan



Gambar 4. Wilayah Pengelolaan Perikanan RI

BAB III HASIL PELAKSANAAN KEGIATAN

3.1 Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya

3.1.1 Tata Usaha/Umum

A. Persuratan dan Kearsipan

Urusan tata usaha/umum merupakan salah satu yang mempunyai peran yang penting dalam mendukung tertib dan kelancaran pelaksanaan kegiatan di Stasiun Pengawasan SDKP Belawan. Urusan tata usaha/umum memiliki tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana, program, dan anggaran serta pengelolaan urusan administrasi keuangan, barang kekayaan milik negara, kepegawaian dan jabatan fungsional, persuratan, kearsipan, perlengkapan dan rumah tangga.

Dalam pelaksanaan administrasi, yang berkaitan dengan persuratan selama tahun 2025 di lingkup Stasiun Pengawasan SDKP Belawan dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2. Persuratan Lingkup Kerja Stasiun Pengawasan SDKP Belawan

No	UPT/Satwas SDKP	Surat Masuk	Surat Keluar	Surat Tugas	Jumlah
1	Belawan	1.529	2.563	821	4.913
2	Langsa	55	1	-	56
3	Asahan	36	61	-	97
4	Rokan Hilir	3	12	-	15
TOTAL		1.623	2.637	821	5.081

Data TU Stasiun Pengawasan SDKP Belawan Tahun 2025

Dari Tabel 2, dapat diketahui jumlah persuratan yang telah dilaksanakan lingkup Stasiun Pengawasan SDKP Belawan selama tahun 2025 Jumlah surat masuk selama tahun 2025 sebanyak 1.623 surat dan jumlah surat keluar selama tahun 2025 sebanyak 2.637 surat. Kegiatan

persuratan lainnya yaitu terdiri dari Surat Tugas sebanyak 821 surat untuk melaksanakan kegiatan tertentu.

B. Barang Milik Negara (BMN)

Nilai BMN per 1 Januari 2025 sebelum penyusutan adalah sebesar Rp75,822,157,340,00 (Tujuh Puluh Lima Juta Delapan Ratus Dua Puluh Dua Juta Seratus Lima Puluh Tujuh Ribu Tiga Ratus Empat Puluh Rupiah) yang terdiri atas nilai BMN intrakomptabel (nilai BMN yang disajikan dalam neraca) Rp35,453,058,683,00 dan nilai BMN ekstrakomptabel sebesar Rp37,248,900,00.

Sedangkan saldo BMN per tanggal 31 Desember 2025 adalah Rp 75.474.295.140,00 (tujuh puluh lima miliar empat ratus tujuh puluh empat juta dua ratus sembilan puluh lima ribu seratus empat puluh rupiah), yang terdiri atas nilai BMN intrakomptabel sebesar Rp 75.437.046.240,00 dan nilai BMN ekstrakomptabel sebesar Rp 37.248.900,00.

Mutasi BMN per Semester II Tahun Anggaran 2025 adalah sebagai berikut :

B.1. Barang Persediaan

Saldo Persediaan Per 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp 671,693,068 (Enam ratus tujuh puluh satu juta enam ratus sembilan puluh tiga ribu enam puluh delapan), yang terdiri dari saldo awal Rp 746,304,007 (tujuh ratus empat puluh enam juta tiga ratus empat ribu tujuh rupiah) dan total mutasi selama Tahun T.A 2025 Rp -74.610.939. Jumlah tersebut dirinci dalam tabel di bawah ini.

Tabel 3. Rincian Mutasi Persediaan di Stasiun PSDKP Belawan KKP Tahunan T.A 2025, Per 31 Desember 2025

AKUN	Uraian	Saldo Awal	Mutasi	Saldo Akhir	Fluktuasi (%)
117111	Barang Konsumsi	10,802,500	(3.028.000)	7,774,500	-0,28
117114	Suku Cadang	735,501,507	(71.582.939)	663,918,568	-0,09

AKUN	Uraian	Saldo Awal	Mutasi	Saldo Akhir	Fluktuasi (%)
Total		746,304,007	(74.610.939)	671.693.068	-0,37

B.1.1 Tanah

Saldo Tanah pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Per 31 Desember Tahun 2025 sebesar Rp1.485.395.729 (Satu miliar empat ratus delapan puluh lima juta tiga ratus sembilan puluh lima ribu tujuh ratus dua puluh sembilan rupiah). Jumlah tersebut terdiri atas saldo awal tanah seluas 6.302 m² (Enam ratus tiga puluh dua) dengan nilai sebesar Rp1.485.395.729 (Satu miliar empat ratus delapan puluh lima juta tiga ratus sembilan puluh lima ribu tujuh ratus dua puluh sembilan rupiah) mutasi tambah seluas 0 m² (nol) dengan nilai sebesar Rp0 (nol) dan mutasi kurang seluas 0 m² (nol) dengan nilai sebesar Rp0 (nol).

B.1.2 Peralatan dan Mesin

Saldo Peralatan dan Mesin pada Laporan Barang Kuasa Pengguna (diisi hanya nilai gabungan *intrakomptabel* dan *ekstrakomptabel*) Per 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp56,569,564,416 (Lima puluh enam miliar lima ratus enam puluh sembilan juta lima ratus enam puluh empat ribu empat ratus enam belas rupiah) jumlah tersebut terdiri atas saldo awal sebesar Rp56,917,426,616 (lima puluh enam miliar sembilan ratus tujuh belas juta empat ratus dua puluh enam ribu enam ratus enam belas rupiah), mutasi tambah sebesar Rp15,137,800 ((lima belas juta seratus tiga puluh tujuh ribu delapan ratus rupiah) dan mutasi kurang sebesar Rp363,000,000 (tiga ratus enam puluh tiga juta rupiah).

B.1.3 Gedung dan Bangunan

Saldo Bangunan Gedung pada Laporan Barang Kuasa Pengguna (diisi hanya nilai gabungan *intra&ekstra*) Per 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp 13.831.651.967 (tiga belas miliar delapan ratus tiga puluh satu juta enam ratus lima puluh satu ribu sembilan ratus enam puluh tujuh rupiah), jumlah tersebut terdiri atas saldo awal sejumlah 26

Unit (dua puluh enam) dengan nilai sebesar Rp13.831.651.967 (tiga belas miliar delapan ratus tiga puluh satu juta enam ratus lima puluh satu sembilan ratus enam puluh tujuh rupiah), mutasi tambah sejumlah 0 Unit (nol) dengan nilai sebesar Rp0 (nol rupiah), dan mutasi kurang sejumlah sejumlah 0 unit (nol) dengan nilai sebesar Rp0,- (nol rupiah)

Rincian Mutasi Gedung dan Bangunan adalah sebagai berikut:

Tabel 4. Rincian Mutasi Gedung dan Bangunan Pada Stasiun PSDKP Belawan Per 31 Desember 2025

Uraian Jenis Transaksi	<i>Intrakomptabel</i> (Rp)	<i>Ekstrakomptabel</i> (Rp)	Total (Rp)
Saldo Awal	13.831.651.967	0	13.831.651.967
Mutasi Tambah	0	0	0
Mutasi Kurang	0	0	0
Saldo Akhir	13.831.651.967	0	13.831.651.967

B.1.4 Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Saldo Jalan, Irigasi dan Jaringan pada Laporan Barang Kuasa Pengguna (diisi hanya nilai gabungan intra&ekstra) Per 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp 3.570.821.028 (tiga miliar lima ratus tujuh puluh juta delapan ratus dua puluh satu ribu dua puluh delapan rupiah), jumlah tersebut terdiri atas saldo awal sebesar 3.570.821.028 (tiga miliar lima ratus tujuh puluh juta delapan ratus dua puluh satu ribu dua puluh delapan rupiah), mutasi tambah sebesar mutasi tambah sebesar Rp0 (nol rupiah) dan mutasi kurang sebesar mutasi tambah sebesar Rp 0 (nol rupiah).

B.1.5 Aset Tetap Lainnya

Saldo Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp 0 (nol rupiah).

B.1.6 Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP)

Saldo Konstruksi Dalam Pengerjaan pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Per 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp0 (nol rupiah).

B.1.7 Aset Lainnya

Aset Lainnya terdiri dari Kemitraan dengan Pihak Ketiga, Aset Tak Berwujud dan Aset yang Dihentikan dari Operasional Pemerintah. Saldo Aset Lainnya pada Laporan Barang Kuasa Pengguna (diisi hanya nilai barang gabungan intra&ekstra) Per 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp 16.862.000 (enam belas juta delapan ratus enam puluh dua ribu rupiah), jumlah tersebut terdiri atas saldo awal sebesar Rp16.862.000 (enam belas juta delapan ratus enam puluh dua ribu rupiah), mutasi tambah sebesar Rp0 (nol rupiah) dan mutasi kurang sebesar Rp0 (nol rupiah).

B.2. Barang Milik Negara pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Per 31 Desember 2025

Nilai BMN pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Per 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp76.535.184.208 (tujuh puluh enam miliar lima ratus tiga puluh lima juta seratus delapan puluh empat ribu dua ratus delapan Rupiah), nilai BMN tersebut disajikan berdasarkan klasifikasi pos-pos perkiraan Neraca yaitu Persediaan; Tanah; Peralatan dan Mesin; Gedung dan Bangunan; Jalan, Irigasi, dan Jaringan; Aset Tetap Lainnya; Konstruksi Dalam Pengerjaan dan Aset Lainnya.

Tabel 5. Nilai BMN Pada Stasiun PSDKP Belawan Per 31 Desember 2025

No	Uraian Neraca	Intrakomptabel		Ekstrakomptabel		Grand Total	
		Rp	%	Rp	%	Rp	%
I	Aset Lancar						
1	Persediaan	671.693.068	0,922	0	0,000	671.693.068	0,921
	Sub Jumlah (1)	671.693.068		0		671.693.068	
II	Aset Tetap						
1	Tanah	1.485.395.729	2,04	0	0,00	1.485.395.729	2,04
2	Peralatan dan Mesin	57.691.560.272	79,16	37.248.900	100	57.728.809.172	79
3	Gedung dan Bangunan	7.566.735.129	10,38	0	0,00	7.566.735.129	10,38
4	Jalan, Irigasi dan Jaringan	3.054.699.149	4,19	0	0,00	3.054.699.149	4,19
5	Aset Tetap Dalam Renovasi	0	0,00	0	0,00	0	0,00
6	Aset Tetap Lainnya	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7	KDP	2.391.158.304	3,28	0	0,00	2.391.158.304	3,28
	Sub Jumlah (2)	72.189.548.583		37.248.900		72.226.797.483	
III	Aset Lainnya						
1	Kemitraan dengan pihak ketiga	0		0		0	
2	Aset Tak Berwujud	0		0		0	
3	Aset yang dihentikan dari penggunaan operasional pemerintahan	16.862.000	0,02	0		16.862.000	0,02
	Sub Jumlah (3)	16.862.000		0		16.862.000	
	Total	72.878.103.651	100	37.248.900	100	72.915.352.551	100

Perkembangan nilai BMN secara gabungan (*intrakomptabel* dan *ekstrakomptabel*) selama 5 (lima) periode terakhir, dapat disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 6. Perkembangan Nilai BMN Pada Stasiun PSDKP Belawan

No	Periode Laporan	Nilai BMN	Perkembangan	
			Rupiah	Persen
1	30 Juni 2021	64.054.123.965	-	-
2	30 Juni 2022	64.281.391.665	227.267.700	0,35%
3	30 Juni 2023	66.372.411.645	2.091.019.980	3,25%
4	30 Juni 2024	68.940.016.179	2.567.604.534	3,87%
5	30 Juni 2025	75.474.295.140	6.534.278.961	9,48%

Nilai BMN yang sudah ditetapkan status penggunaannya pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Per 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 7. Ringkasan Nilai Penetapan Status Penggunaan BMN pada Stasiun PSDKP Belawan Per 31 Desember 2025

No	Uraian	Sudah Ditetapkan Status Penggunaan (Rp)	Belum Ditetapkan Status Penggunaan (Rp)
1	Tanah	1.485.395.729	
2	Peralatan dan Mesin	56.423.956.616	145.607.800
3	Gedung dan Bangunan	13.831.651.967	
4	Jalan, Irigasi dan Jaringan	3.570.821.028	
5	Aset Tetap Lainnya	16.862.000	
6	Aset Tak Berwujud		
TOTAL		75.328.687.340	145.607.800

Tabel 8. Ringkasan Pengelolaan BMN Pada Stasiun PSDKP Belawan per 31 Desember 2025

No	Uraian	Penggunaan	Pemanfaatan	Pemin dahtan gana n	Penghapusan	Jumlah
1	Dalam proses Pengajuan Surat ke Pengguna Barang	145.607.800			363.000.000	217.392.200
2	Dalam proses pengajuan Surat ke Pengelola Barang					
3	Dalam proses Pengelola Barang					
4	Selesai di Pengelola Barang					
	a. Dikembalikan					
	b. Ditolak					
	c. Disetujui					
5	Dalam proses tindak lanjut Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang					
6	Telah diterbitkan Keputusan dari Pengguna				16.862.000	
7	Tindak lanjut oleh kuasa Pengguna Barang					
8	Selesai serah terima					
TOTAL		145.607.800	0	0	379.862.000	217.392.200

Nilai BMN dengan kondisi Rusak Berat yang telah diusulkan pemindahtanganan, pemusnahan, atau penghapusannya kepada Pengelola Barang pada Stasiun PSDKP Belawan Per 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp 363.000.000 (tiga ratus enam puluh tiga juta rupiah). Jumlah tersebut terdiri atas BMN Intrakomptabel sebesar Rp 363.000.000 (tiga ratus enam puluh tiga juta rupiah) dan BMN Ekstrakomptabel sebesar Rp0 (nol rupiah). BMN tersebut telah dikeluarkan dari penyajian dalam laporan BMN pada Stasiun PSDKP Belawan Per 31 Desember 2025.

3.1.2 Program dan Anggaran

Anggaran yang dikelola Stasiun Pengawasan SDKP Belawan TA. 2025 semula sebesar Rp. 31.682.833.000,- (*Tiga puluh satu miliar enam ratus delapan puluh dua juta delapan ratus tiga puluh tiga ribu rupiah*) berubah menjadi Rp. 28.996.148.000,- (*Dua puluh delapan miliar Sembilan ratus Sembilan puluh enam juta serratus empat puluh delapan ribu rupiah*) setelah mengalami Empat belas kali revisi DIPA, dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 9. Rekap Revisi DIPA TA 2025 Stasiun PSDKP Belawan

No	Revisi	Tanggal	Pagu	Kewenangan Revisi	Keterangan
1	DIPA Awal	30 November 2025	36.996.148.000	-	-
2	DIPA 1	24 Februari 2025	31.682.833.000	DJA	Perubahann Kode Blokir (Kode 2 menjadi A)
3	DIPA 2	03 Maret 2025	31.682.833.000	KANWIL	Revisi Optimalisasi Anggaran Pemutakhiran POK
4	DIPA 3	25 Maret 2025	31.682.833.000	DJA	Revisi Pengembalian RO Cadangan Ke RO nya Masing masing
5	DIPA 4	14 April 2025	31.682.833.000	DJA	Optimalisasi Anggaran dengan Pemutakhiran POK
6	DIPA 5	15 Mei 2025	31.682.833.000	KANWIL	Optimalisasi Anggaran dengan Pemutakhiran POK
7	DIPA 6	26 Mei 2025	31.682.833.000	DJA	Revisi Buka Blokir Kode 2

8	DIPA 7	08 Juli 2025	31.682.833.000	KANWIL	Optimalisasi Anggaran dengan Pemutakhiran POK
9	DIPA 8	16 Juli 2025	31.682.833.000	KANWIL	Revisi RPD HAL III DIPA
10	DIPA 9	19 Agustus 2025	31.682.833.000	KANWIL	Optimalisasi Anggaran dengan Pemutakhiran POK
11	DIPA 10	01 Oktober 2025	31.682.833.000	KANWIL	Optimalisasi Anggaran dengan pemutakhiran POK
12	DIPA 11	14 Oktober 2025	31.682.833.000	KANWIL	Revisi RPD HAL III DIPA
13	DIPA 12	19 November 2025	28.996.148.000	DJA	Revisi Penambahan Anggaran Akun 524 dan anggaran 002
14	DIPA 13	12 Desember 2025	28.996.148.000	KANWIL	Optimalisasi Anggaran Dengan pemutakhiran POK
15	DIPA 14	15 Desember 2025	28.996.148.000	KANWIL	Optimalisasi Anggaran dengan Pemutakhiran POK
16	DIPA 15	25 Desember 2025	28.996.148.000	KANWIL	Optimalisasi Anggaran dengan Pemutakhiran POK
17	DIPA 16	27 Desember 2025	28.996.148.000	KANWIL	Optimalisasi Anggaran dengan Pemutakhiran POK

Data TU Stasiun Pengawasan SDKP Belawan Tahun 2025

Dari total anggaran tersebut, terdapat 5 program/kegiatan yaitu :

1. Program Peningkatan Pemantauan dan Operasi Armada, dengan jumlah anggaran yang dikelola sebesar Rp 10.645.896.559,- (Sepuluh miliar enam ratus empat puluh lima juta delapan ratus Sembilan puluh enam ribu lima ratus lima puluh sembilan *rupiah*);
2. Program Penanganan Pelanggaran Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan, dengan jumlah anggaran yang dikelola sebesar Rp. 121.751.282,- (Seratus dua puluh satu juta tujuh ratus lima puluh satu ribu dua ratus delapan puluh dua *rupiah*);

3. Program Peningkatan Operasional Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Kelautan dengan jumlah anggaran yang dikelola sebesar Rp. 107.102.687,- (Seratus tujuh juta serratus dua ribu enam ratus delapan puluh tujuh rupiah);
4. Program Peningkatan Operasional Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Perikanan dengan jumlah anggaran yang dikelola sebesar Rp. 227.099.978,- (Dua Ratus dua puluh tujuh juta sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus tujuh puluh delan rupiah);
5. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Pengawasan SDKP dengan jumlah anggaran yang dikelola sebesar Rp. 15.270.539.648,- (Lima belas miliar dua ratus tujuh puluh juta lima ratus tiga puluh Sembilan ribu enam ratus empat puluh delapan rupiah).

Realisasi anggaran yang terserap tahun 2025 sebesar Rp 26.422.679.177 (Dua puluh enam miliar empat ratus dua puluh dua juta enam ratus tujuh puluh Sembilan ribu serratus tujuh puluh tujuh rupiah). Untuk lebih jelasnya, realisasi anggaran tiap program kegiatan Stasiun Pengawasan SDKP Belawan tahun 2025 dapat dilihat pada Tabel 10.

Tabel 10. Realisasi Anggaran Per Program/Kegiatan TA.2025

KODE	KEGIATAN	JUMLAH ANGGARAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN	
			(Rp)	%
2350	Peningkatan Pemantauan dan Operasi Armada	12.804.051.000	10.645.896.559	83,14
2351	Penanganan Pelanggaran Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan	124.487.000	121.751.282	97,80
2352	Peningkatan Operasional Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Kelautan	107.104.000	107.102.687	100

2352	Peningkatan Operasional Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Perikanan	233.099.000	227.099.976	97,43
2355	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen PSDKP	15.342.147.000	15.270.539.648	99,53
	JUMLAH	28.661.393.000	26.422.679.177	92,19

Data Keuangan Stasiun Pengawasan SDKP Belawan Tahun 2025



Gambar 5. Realisasi Anggaran Per Program/Kegiatan TA.2025

3.1.3 Kepegawaian

Sumber daya manusia yang ada di lingkup Stasiun Pengawasan SDKP Belawan sampai akhir tahun 2025 berjumlah 136 orang yang terdiri dari PNS (Ditjen PSDKP) berjumlah 71 orang, Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) berjumlah 36 orang, PPPK Paruh Waktu berjumlah 13 orang, PJLP berjumlah 13 orang dan 3 orang Peserta Program Magang Nasional KKP. Pegawai tersebut berada di Stasiun Pengawasan SDKP Belawan, Satwas dan Wilker lingkup Stasiun Pengawasan SDKP Belawan.

Tabel 11. Komposisi Pegawai Lingkup Stasiun Pengawasan SDKP Belawan berdasarkan Status Pegawai

No	Status Pegawai	Jumlah (orang)	%
1	Pegawai Negeri Sipil	47	34,56
2	Pegawai Negeri Sipil Awak Kapal Pengawas	23	16,91
3	Pegawai Negeri Sipil Dari Luar UPT	1	0,74
4	Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja	21	15,44
5	PPPK Awak Kapal Pengawas	7	5,15
6	PPPK Awak Kapal Pengawas dari Luar UPT	8	5,88
7	PPPK Paruh Waktu	13	9,56
8	PJLP	13	9,56
9	Magang	3	2,21
Total		136	100

Data TU Stasiun Pengawasan SDKP Belawan Tahun 2025

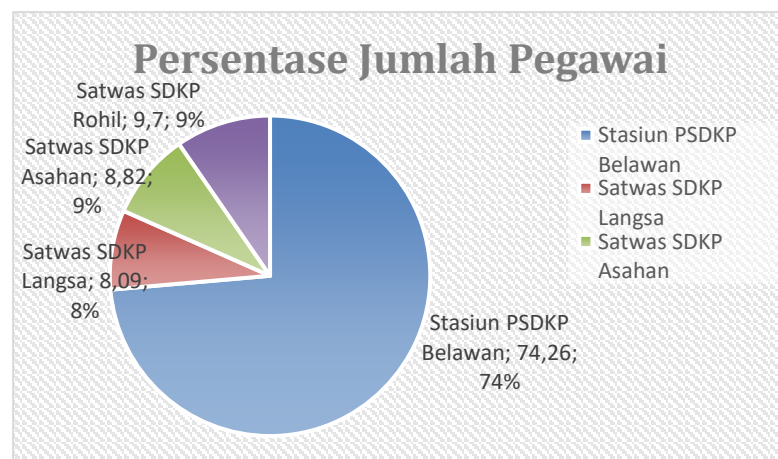
Jumlah pegawai pada masing-masing unit kerja berbeda-beda sesuai dengan banyaknya kegiatan pengawasan. Komposisi pegawai Stasiun Pengawasan SDKP Belawan di setiap unit kerja disajikan pada tabel berikut :

Tabel 12. Komposisi Pegawai Stasiun Pengawasan SDKP Belawan Berdasarkan Satuan Pengawasan Tahun 2025

No	Unit kerja	Jumlah Pegawai (orang)										%	
		Pegawai/Pengawas Perikanan							Awak Kapal Pengawas				Total
		PNS	PPPK	PPPK PARUH WAKTU	PJLP	MAG ANG	DARI UPT LUAR		PNS	PPPK	DARI UPT LAIN		
1	Stasiun PSDKP Belawan	27	14	8	10	3	1		23	7	8	101	74,26
2	Satwas SDKP Langsa	7	0	2	2							11	8,09
3	Satwas SDKP Asahan	5	6	0	1							12	8,82
4	Satwas SDKP Rokan Hilir	8	1	3	0							12	8,82
Total		47	21	13	13	3	1		23	7	8	136	100,00

Data TU Stasiun Pengawasan SDKP Belawan Tahun 2025

Tabel 12 menunjukkan bahwa dari 136 pegawai dengan status kepegawaian PNS, PPPK, PPPK Paruh Waktu, PJLP dan Peserta Program Magang Nasional KKP pada lingkup kerja Stasiun Pengawasan SDKP Belawan tersebar di beberapa Satwas.



Gambar 6. Komposisi Pegawai yang tersebar di Satwas SDKP Lingkup Stasiun Pengawasan SDKP Belawan

Tabel 13. Komposisi PNS Pengawasan SDKP lingkup Stasiun Pengawasan SDKP Belawan Berdasarkan Tingkat Golongan Tahun 2025

Golongan	Jumlah (Orang)					Total	%
	A	B	C	D	E		
Gol. IV	2	-	-	-	-	2	1,8
Gol. III	14	8	20	15	-	57	53,2
Gol. II	2	3	2	5	-	12	11,2
IX	-	-	-	-	-	20	18,7
VII	-	-	-	-	-	5	4,7
V	-	-	-	-	-	11	10,2
Total	17	11	22	20	-	107	100,00

Data TU Stasiun Pengawasan SDKP Belawan Tahun 2025

Tabel 13 menunjukkan jumlah pegawai berdasarkan tingkat golongan dimana untuk PNS golongan II berjumlah 12 orang, PNS golongan III berjumlah 57 orang, dan PNS golongan IV berjumlah 2 orang. PPPK golongan V berjumlah 11 orang, PPPK golongan VII berjumlah 5 orang dan PPPK golongan IX berjumlah 20 rang. Dari data pegawai tersebut dapat diperoleh informasi bahwa pegawai yang paling banyak di Stasiun Pengawasan SDKP Belawan adalah golongan III. Dengan demikian diharapkan Stasiun Pengawasan SDKP Belawan mampu menjadi unit yang profesional sesuai tugas dan fungsinya.

Tingkat pendidikan PNS, PPPK, PPPK Paruh Waktu, PJLP dan Peserta Program Magang Nasional KKP yang bekerja di lingkup UPT Stasiun Pengawasan SDKP Belawan didominasi oleh Magister (S2), Sarjana (S1), Diploma IV (D-IV), Diploma III (D-III) dan Sekolah Menengah Atas (SMA) sederajat. Adapun komposisi PNS, PPPK, PPPK Paruh Waktu, PJLP dan Peserta Program Magang Nasional KKP di Stasiun Pengawasan SDKP Belawan Tahun 2025 berdasarkan tingkat pendidikan, dilihat pada Tabel 15.

Tabel 14. Komposisi Pegawai PNS, PPPK, PPPK Paruh Waktu dan PJLP Stasiun Pengawasan SDKP Belawan Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah (orang)					
		PNS	PPPK	PPPK Paruh Waktu	PJLP	Jumlah	(%)
1	S2	11	-	-	-	11	8,09
	S1	26	13	1	2	44	32,35
2	DIV	13	7	-	1	22	16,18
	DIII	10	5	-	2	17	12,50
3	SMA/ sederajat	11	11	12	8	42	30,88
Total		71	36	13	13	136	100

Data TU Stasiun Pengawasan SDKP Belawan Tahun 2025

Jumlah Pejabat Fungsional yang ada di Stasiun Pengawasan SDKP Belawan pada Tahun 2025 sebanyak 49 orang yang terdiri dari Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang bertugas di Satwas dan Wilker lingkup Stasiun Pengawasan SDKP Belawan dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 15. Jabatan Fungsional yang ada di Stasiun Pengawasan SDKP Belawan

No	Nama Jabatan	Jumlah (orang)	
		PNS	PPPK
1	Pengawas Perikanan Ahli Muda	14	-
2	Pengawas Perikanan Ahli Pertama	5	10
3	Asisten Pengawas Perikanan Terampil	3	1
4	Asisten Pengawas Perikanan Pemula	-	6
5	Pengawas Kelautan Ahli Muda	1	-
6	Pengawa Kelautan Ahli Pertama	1	-
7	Asisten Pengawas Kelautan Terampil	1	-
8	Penata Perizinan Ahli Muda	5	-
9	Analisis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Pertama	1	-
10	Pranata Keuangan APBN Penyelia	1	
Total		32	17

Data TU Stasiun Pengawasan SDKP Belawan Tahun 2025

Tahun 2025 terdapat perubahan mekanisme kenaikan pangkat pegawai berubah dari 4 periode menjadi 12 periode dalam satu tahun. Jumlah pegawai yang mendapatkan kenaikan pangkat pada periode April berjumlah 5 orang, terlihat pada tabel berikut :

Tabel 16. Pegawai yang mendapatkan kenaikan pangkat periode April 2025

No	N a m a	Pangkat Semula	Menjadi
1	Muhamad Syamsu Rokhman	Penata Tk. I, III/d	Pembina, IV/a
2	Dhidit Setiawan	Penata Muda, III/a	Penata Muda Tk.I, III/b
3	Wahyuri Purnamasari	Pengatur Tk. I, II/d	Penata Muda, III/a
4	Afriani	Pengatur Tk. I, II/d	Penata Muda, III/a
5	Samsul Bahri	Pengatur Muda Tk. I, II/b	Pengatur, II/c

Data TU Stasiun Pengawasan SDKP Belawan Tahun 2025

Sedang periode Agustus ada 1 orang yang mendapatkan kenaikan pangkat terlihat pada tabel berikut :

Tabel 17. Pegawai yang mendapatkan kenaikan pangkat periode Agustus 2025

No	N a m a	Pangkat Semula	Menjadi
1	Siti Safiera	Penata Muda Tk. I, III/b	Penata, III/c

Data TU Stasiun Pengawasan SDKP Belawan Tahun 2025

Periode September tidak ada pegawai yang mendapatkan kenaikan pangkat.

Sedang periode Oktober ada 2 orang yang mendapatkan kenaikan pangkat terlihat pada tabel berikut :

Tabel 18. Pegawai yang mendapatkan kenaikan pangkat periode Oktober

No	N a m a	Pangkat Semula	Menjadi
1	Afrinadewi	Pengatur Tk. I, II/d	Penata Muda, III/a
2	Anton Sukrida	Pengatur Tk. I, II/d	Penata Muda, III/a

Data TU Stasiun Pengawasan SDKP Belawan Tahun 2025

Periode November tidak ada pegawai yang mendapatkan kenaikan pangkat.

Periode Desember tidak ada pegawai yang mendapatkan kenaikan pangkat.

Dalam rangka untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan tugas di lingkup Stasiun Pengawasan SDKP Belawan, tanggal 11 Februari 2025 terdapat pegawai yang ditetapkan sebagai Ketua Tim Kerja, terlihat pada tabel berikut :

Tabel 19. Ketua Tim Kerja

No	N a m a	Jabatan	Ketua Tim Kerja
1	Mujtaba Umar Nasution, SE	Kepala Urusan Umum	Urusan Umum
2	Jefri Silalahi, S.Pi	Pengawas Perikanan Ahli Muda	Prasarana, Sarana & Operasi Kapal Pengawas
3	Tupa Prosasdi Sitanggang , S.Pi	Pengawas Perikanan Ahli Muda	Intelijen Pengawasan Sumber Daya Perikanan
4	Muhammad Iqbal, S.Pi	Pengawas Kelautan Ahli Muda	Intelijen Pengawasan Sumber Daya Kelautan
5	Josia Suarta Sembiring, S.H, M.H	Pengawas Perikanan Ahli Muda	Penanganan Pelanggaran

Data TU Stasiun Pengawasan SDKP Belawan Tahun 2025

Stasiun Pengawasan SDKP Belawan pada tahun 2025 mendapat tambahan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) sebanyak 1 orang, PPPK sebanyak 10 orang dan Pengangkatan PPPK Paruh Waktu sebanyak 13 orang sebagai berikut :

Tabel 20. Calon Pegawai Negeri Sipil Tahun 2025

No	N a m a	TMT	Jabatan
1	Emmanuel Lintang Cakrawala	1 Juni 2025	Juru Mudi Kapal Kelas III

Data TU Stasiun Pengawasan SDKP Belawan Tahun 2025

Tabel 21. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Tahun 2025

No	N a m a	TMT	Jabatan
1	Juli Sasmitasari	1 Oktober 2025	Penata Layanan Operasional
2	Maysarah Paramitha Sahea	1 Oktober 2025	Penata Layanan Operasional
3	Graha Akbar Lingga	1 Oktober 2025	Penata Layanan Operasional
4	Mhd. Indra Gunawan	1 Oktober 2025	Penata Layanan Operasional
5	Ikhsan Setiawan	1 Oktober 2025	Penata Layanan Operasional
6	Muhammad Rifai	1 Oktober 2025	Penata Layanan Operasional
7	Rifka Ade Shinta	1 Oktober 2025	Penata Layanan Operasional
8	Christina Simorangkir	1 Oktober 2025	Penata Layanan Operasional
9	Rizka Ramadhani	1 Oktober 2025	Penata Layanan Operasional
10	Reni Asmarny	1 Oktober 2025	Penata Layanan Operasional

Data TU Stasiun Pengawasan SDKP Belawan Tahun 2025

Tabel 22. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Paruh Waktu Tahun 2025

No	N a m a	TMT	Jabatan
1	Desi Eriyanti	1 Oktober 2025	Operator Layanan Operasional
2	Rusmin	1 Oktober 2025	Operator Layanan Operasional
3	Muhadi	1 Oktober 2025	Penata Layanan Operasional
4	Afrizal	1 Oktober 2025	Operator Layanan Operasional
5	Fitra Yusuf	1 Oktober 2025	Operator Layanan Operasional
6	Dede Syahputra	1 Oktober 2025	Operator Layanan Operasional

No	N a m a	TMT	Jabatan
7	Oko Sarles	1 Oktober 2025	Operator Layanan Operasional
8	Gian Ginanjar	1 Oktober 2025	Operator Layanan Operasional
9	SM Khalidi	1 Oktober 2025	Operator Layanan Operasional
10	Muhammad Tarmizi	1 Oktober 2025	Operator Layanan Operasional
11	Menanti P Hutagalung	1 Oktober 2025	Operator Layanan Operasional
12	M. Agus Hartono	1 Oktober 2025	Operator Layanan Operasional
13	Mahendra	1 Oktober 2025	Operator Layanan Operasional

Data TU Stasiun Pengawasan SDKP Belawan Tahun 2025

Pegawai lingkup Stasiun Pengawasan SDKP Belawan yang mendapatkan kenaikan gaji berkala pada Tahun 2025 berjumlah 31 orang, dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 23. Kenaikan Gaji Berkala Pegawai Tahun 2025

BULAN	NAMA PEGAWAI		GOL	KETERANGAN
Januari	1	Adhi Kurniadi, S.St.Pi	III-d	KGB mulai tanggal 1 Januari 2025
	2	Vina Indriani De Saire, A.Md	III-b	KGB mulai tanggal 1 Januari 2025
	3	Bahrudin	III-b	KGB mulai tanggal 1 Januari 2025
	4	Budi Setiawan Pangaribuan	III-a	KGB mulai tanggal 1 Januari 2025
	5	Wahyuri Purnamasari, A.Md	II-d	KGB mulai tanggal 1 Januari 2025
	6	Nurhaidir Malik	II-d	KGB mulai tanggal 1 Januari 2025
	7	Indra Dwi Cahyo	II-a	KGB mulai tanggal 1 Januari 2025
	8	Kelvin Ramadhan	II-b	KGB mulai tanggal 1 Januari 2025
Februari	1	Fauzi Nyinga Mura, A.Md	III-c	KGB mulai tanggal 1 Februari 2025

	2	Abdullah Ali Hakim Nasution, S.Pi	III-b	KGB mulai tanggal 1 Februari 2025
	3	Desy Natalia, A.Md	II-d	KGB mulai tanggal 1 Februari 2025
Maret	1	Alfian Rio Susanto	III-c	KGB mulai tanggal 1 Maret 2025
	2	Siswo Wijanarko	III-a	KGB mulai tanggal 1 Maret 2025
	3	Abul Hayyi Almufrodi, S.Pi	III-c	KGB mulai tanggal 1 Maret 2025
	4	Perkasa Sembiring, S.Pi	III-c	KGB mulai tanggal 1 Maret 2025
	5	Arya Rocky A Damanik, SE	III-c	KGB mulai tanggal 1 Maret 2025
	6	Anwar Harahap, S.Sos	III-c	KGB mulai tanggal 1 Maret 2025
	7	Mujtaba Umar Nasution, SE	III-c	KGB mulai tanggal 1 Maret 2025
	8	Hardiansyah, A.Md	III-a	KGB mulai tanggal 1 Maret 2025
	9	Candra Nurdiansyah	II-a	KGB mulai tanggal 1 Maret 2025
	10	Muhammad Iqbal	II-a	KGB mulai tanggal 1 Maret 2025
	11	Hendri Hamzah, A.Md	III-c	KGB mulai tanggal 1 Maret 2025
Mei	1	Muhammad Fahrul Riza, S.I.K	III-b	KGB mulai tanggal 1 Mei 2025
Oktober	1	Achmad Muttaqin, A.Md	II-d	KGB mulai tanggal 1 Oktober 2025
Desember	1	Afrinadewi	III-a	KGB mulai tanggal 1 Desember 2025
	2	Jefri Silalahi, S.Pi	III-d	KGB mulai tanggal 1 Desember 2025
	3	Hartoto, S.Pi	III-d	KGB mulai tanggal 1 Desember 2025
	4	Josia Suarta Sembiring, S.H	III-c	KGB mulai tanggal 1 Desember 2025
	5	Tupa Prosasdi Sitanggang, S.Pi	III-d	KGB mulai tanggal 1 Desember 2025
	6	Fitri Zuliana, S.Pi, M.M.A	III-d	KGB mulai tanggal 1 Desember 2025
	7	Denggan Muhammad Ilmi, S.Pi	III-d	KGB mulai tanggal 1 Desember 2025

Data TU Stasiun Pengawasan SDKP Belawan Tahun 2025

Pada tahun 2025 pegawai yang melakukan mutasi masuk ke Stasiun Pengawasan SDKP Belawan adalah sebagai berikut :

1. Eman Samuel Monintja, S.Pi dari Stasiun PSDKP Tahuna (TMT 12 Maret 2025)
2. Arumwati, S.Pi dari Pangkalan PSDKP Batam (TMT 1 Maret 2025)
3. Erin Boy Rajagukguk, S.St.Pi dari Dit. POA (TMT 1 Agustus 2025)
4. Rinondang Panggabean, S.St.Pi dari Dit. POA (TMT 1 Agustus 2025)
5. Mukani, A.Md., S.Tr.Pi dari Stasiun PSDKP Pontianak (TMT 1 Agustus 2025)
6. Dedi Kurniawan Pohan, A.Md dari Stasiun PSDKP Pontianak (TMT 1 Agustus 2025)
7. Felix Paduli, A.Md, S.Tr.Pi dari Pangkalan PSDKP Bitung (TMT 1 Agustus 2025)

Sedangkan yang pindah dari Stasiun Pengawasan SDKP Belawan adalah sebagai berikut :

1. Adhi Kurniadi, S.ST.Pi ke Pangkalan PSDKP Batam (TMT 1 Maret 2025)
2. Edy Sutanto, S.Pi ke Stasiun PSDKP Cilacap (TMT 1 Juni 2025)
3. Chaidi Rindiawati, A.Md.Pi ke Pangkalan PSDKP Jakarta (TMT 1 Juli 2025)
4. Albert Essing, A.Md, S.PKP ke Pangkalan PSDKP Batam (TMT 1 Agustus 2025)
5. Fauzi Nyinga Mura, A.Md ke Stasiun PSDKP Pontianak (TMT 1 Agustus 2025)
6. Marthy Arny Toemigoloeng, A.Md, S.PKP ke Stasiun PSDKP Tahuna (TMT 1 Agustus 2025)
7. Sirman Rajagukguk, S.Pi, M.Sc ke Dit. POA (TMT 1 Oktober 2025)
8. Alfian, A.Md.Pel ke Pangkalan PSDKP Lampulo (TMT 1 Desember 2025).

Dalam rangka menunjang kegiatan administrasi dan pengawasan Satwas dan Wilker PSDKP, pada tahun 2025 dilakukan perekrutan PJLP sebanyak 13 orang, dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 24. Tenaga PJLP Tahun 2025

No	N a m a	Jabatan	Lokasi Penempatan
1	Natasya Fitrianda	Sekretaris Pimpinan	Stasiun PSDKP Belawan
2	Lili Afriyanti	Pramubakti	Stasiun PSDKP Belawan
3	Muhammad Teguh Simanjuntak	Petugas Pemeliharaan dan Perawatan Speedboat	Stasiun PSDKP Belawan
4	Syahrul Pradana	Petugas Pemeliharaan dan Perawatan Speedboat	Stasiun PSDKP Belawan
5	Irfan Dani Syahputra	Petugas Layanan Informasi	Stasiun PSDKP Belawan
6	Anggi	Petugas Layanan Informasi	Stasiun PSDKP Belawan
7	Siti Zubaidah	Petugas Layanan Informasi	Stasiun PSDKP Belawan
8	Rio Sakti	Pengemudi Operasional	Stasiun PSDKP Belawan
9	Azhari	Petugas Keamanan	Satwas Langsa
10	Reza Muhajir	Petugas Keamanan	Satwas Langsa
11	Mahdar	Petugas Keamanan	Stasiun PSDKP Belawan
12	Wisnu Pranoto	Petugas Keamanan	Stasiun PSDKP Belawan
13	Ridwan Hakim	Petugas Keamanan	Satwas Asahan

Data TU Stasiun Pengawasan SDKP Belawan Tahun 2025

Untuk meningkatkan kompetensi Pegawai Negeri Sipil, Stasiun Pengawasan SDKP Belawan telah mengikutsertakan Pegawai Negeri Sipil dalam pendidikan dan pelatihan seperti pada tabel berikut :

Tabel 25. Pelatihan, Diklat, Bimbingan Teknis Pegawai TA. 2025

No	Jenis Kegiatan	Tanggal	Tempat	Peserta yang hadir
1	Workshop Pilot Drone dan Pemetaan Ruang Laut	29 Januari – 9 Februari 2025	Subang, Jawa Barat	Edy Sutanto
2	Pelatihan Teknis dan Sertifikasi Kompetensi SIG bagi Polsus PWP3K	29 Januari – 9 Februari 2025	Subang, Jawa Barat	Edy Sutanto
3	Graduate Certificate in Law (Maritime Studies)	6 Februari – 1 Juli 2025	Australia National University	Inggrika Remalia Kaban
4	Pelatihan jarak Jauh PPK dan/atau PPSPM	3 Februari – 3 April 2025	Daring	Zahra Rasyid, Abdullah Ali Hakim Nasution, Mujtaba Umar Nasution
5	Pelatihan Kepemimpinan Pengawas	14 April – 17 September 2025	Daring	Mujtaba Umar Nasution
6	Pelatihan Sertifikasi Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Level 1	Juni – Juli 2025	Daring	Siti Safiera, Anwar Harahap, Vina Indriani de Saire, Muhammad Iqbal, Retno Adiarti
7	Pelatihan Dasar Jabatan Fungsional Asisten Pengawas Perikanan Tahun 2025	17 – 27 Juni 2025	Daring	Achmad Muttaqin, Gustiya Dwi Llaksono, Indra Dwi Cahyo, Candra Nurdiansyah, Yuni Syahputra, Sri Andoko, Taufik Ismail, Yahya Thussalam, Alfian, Sudariyanto, Siswo Wijanarko, Nurhaidir Malik, Anton Sukrida, Abdiyullah, Muhammad Budi Indra Purnama, Syahrul Ishak, Yul Harisman
8	Pelatihan KOMCAD TA.2025	30 Juli 2025	Halim Perdana Kusuma, Jakarta	Emmanuel Lintang Cakrawala
9	Lokakarya Australia-Indonesia Strong Borders Program –	9 Desember 2025	Medan	Zulkarnain Nasution, Inggrika Remalia Kaban,

	Border Threats Workshop in Medan			Perkasa Sembiring, Nur Baety Alifiani, Kelvin Ramadhan
--	----------------------------------	--	--	--

Data TU Stasiun Pengawasan SDKP Belawan Tahun 2025

Selain meningkatkan kompetensi pegawai, Stasiun Pengawasan SDKP Belawan juga mengusulkan pegawai untuk mengikuti Uji Kompetensi dalam rangka Perpindahan Jabatan dan Kenaikan Jenjang Jabatan Fungsional agar dapat mengisi formasi jabatan fungsional yang tersedia pada peta jabatan. Selain itu, Stasiun Pengawasan SDKP Belawan juga mengusulkan pegawai yang akan yang akan naik pangkat regular untuk mengikuti Ujian Dinas.

Tabel 26. Sertifikasi Kompetensi dan Ujian Dinas Pegawai TA. 2025

No	Jenis Kegiatan	Tempat	Pegawai yang diusulkan
1	Uji Kompetensi Perpindahan Jabatan Fungsional Arsiparis	Daring	Vina Indriani de Saire
2	Uji Kompetensi PPK Tipe C	Daring	Zahra Rasyid
3	Uji Kompetensi Kenaikan Jenjang Jabatan Analis Keuangan APBN dan Pranata Keuangan APBN	KPPN II Medan	Arya Rocky A Damanik
4	Uji Kompetensi Perpindahan Jabatan Fungsional Pengawas Perikanan	Daring	Zahra Rasyid, Imran Rosyadi, Askari, Sri Kartaharja, Hardiansyah
5	Uji Kompetensi Kenaikan Jenjang Jabatan Fungsional Pengawas Perikanan	Daring	Denggan Muhammad Ilmi, Zulkadrihani, Abul Hayyi Almufrodi
6	Ujian Dinas Tk. I	Daring	Gustiya Dwi Laksono

Data TU Stasiun Pengawasan SDKP Belawan Tahun 2025

3.2 Peningkatan Operasional dan Operasi Armada

Program/kegiatan dalam rangka Peningkatan Pemantauan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan dan Operasi Armada mengacu pada rencana pengadaan yang terdapat pada RKA-K/L Stasiun Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Tahun

Anggaran 2025, rencana pemantauan sumber daya perikanan serta pelaksanaan patroli kapal pengawas dan speed boat selama tahun 2025.

Target dan realisasi pengadaan sarana pengawasan lingkup Stasiun Pengawasan SDKP Belawan tahun 2025 terlihat pada tabel berikut :

Tabel 27. Pencapaian Kegiatan Peningkatan Operasional Sumber Daya Kelautan dan Perikanan dan Operasi Armada

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
Jumlah pemenuhan infrastruktur pengawasan yang memadai secara akuntabel dan tepat waktu :			
1. Pengadaan BBM Kapal Pengawas	1 pkt	1 pkt	100 %
2. Servis Perlengkapan Keselamatan dan PMK	1 pkt	1 pkt	100 %
3. Pengadaan Suku Cadang Kapal Pengawas	1 pkt	1 pkt	100%
4. Perawatan Darurat Kapal Pengawas	1 pkt	1 pkt	100%
5. Pengadaan Seragam Awak Kapal Pengawas dan pegawai	1 pkt	1 pkt	100%
6. Docking Speedboat Napoleon 028 Stasiun PSDKP Belawan	1 pkt	1 pkt	100%
7. Servis Perlengkapan Keselamatan dan PMK Speedboat Napoleon 028	1 pkt	1 pkt	100%
8. Pengadaan Suku Cadang dan Perlengkapan Speedboat Pengawas Napoleon 028	1 pkt	1 pkt	100 %
9. Perawatan Darurat Speedboat Napoleon 028	1 pkt	1 pkt	100 %
10. Pemasangan dan pembuatan Instalasi Listrik Darat	1 pkt	1 pkt	100 %
11. Pembuatan Dermaga Darurat Kapal Pengawas	1 pkt	1 pkt	100 %

Data Sarpras Stasiun Pengawasan SDKP Belawan Th 2025

3.2.1 Pembuatan Instalasi Listrik Darat

Telah dilaksanakan kegiatan pemasangan dan pembuatan instalasi listrik darat untuk kapal pengawas di lingkungan stasiun PSDKP belawan, yang meliputi tiga lokasi strategis, yaitu di dermaga BPPP Medan, Dermaga Satwas SDKP langsa, dan Dermaga dumai. kegiatan ini dirancang dengan tujuan utama untuk menghemat kebutuhan bahan bakar minyak (BBM) yang digunakan sebagai sumber energi dalam

kondisi stasioner di kapal pengawas. selain itu, instalasi listrik darat ini diharapkan dapat meningkatkan efisiensi operasional kapal, memberikan solusi lebih ramah lingkungan dengan mengurangi emisi gas buang yang dihasilkan dari penggunaan bbm, serta mendukung keberlanjutan program pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan. dengan adanya fasilitas ini, diharapkan kapal pengawas dapat beroperasi dengan lebih optimal, sehingga mampu menjalankan fungsi pengawasan dan perlindungan terhadap sumber daya kelautan secara lebih efektif dan efisien, serta memberikan kontribusi positif terhadap upaya pelestarian lingkungan maritim di wilayah kerja Stasiun PSDKP Belawan.





Gambar 7. Pembuatan Instalasi Listrik Darat

3.2.2 Pembuatan Dermaga Darurat Kapal Pengawas

Pembuatan dermaga darurat untuk kapal pengawas di lingkup Stasiun PSDKP Belawan merupakan langkah strategis untuk menyediakan tempat bersandar bagi kapal pengawas, mengingat kondisinya di mana keberadaan kapal pengawas tersebut telah menutupi alur yang biasa dilalui oleh para nelayan. Dermaga darurat ini berlokasi di samping Dermaga BPPP Medan, dengan pertimbangan bahwa lokasi tersebut sudah dilengkapi dengan fasilitas listrik darat. Dengan adanya fasilitas listrik darat, kapal pengawas dapat beroperasi dengan lebih efisien, serta mendapatkan pasokan energi yang memadai tanpa bergantung pada sumber bahan bakar minyak dalam waktu yang panjang. Pembuatan dermaga ini bertujuan tidak hanya untuk menentukan zona bersandar yang aman dan fungsional bagi kapal pengawas, tetapi juga untuk memastikan kelancaran aktivitas pengawasan terhadap sumber daya kelautan serta menjaga keberlangsungan dan keselamatan operasional nelayan di wilayah tersebut. Dengan demikian, diharapkan bahwa keberadaan dermaga darurat ini dapat meningkatkan efektivitas pengawasan Sumber daya kelautan dan perikanan.

Gambar 8. Pembuatan Dermaga Darurat Kapal Pengawas



3.2.3. Operasional dan Pemeliharaan Kapal Pengawas dan Speed Boat

Dalam rangka melaksanakan pengawasan SDKP dan penegakan hukum di bidang perikanan di wilayah teritorial dan Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia (WPP-RI 571, 572 dan 711) telah dilaksanakan patroli pengawasan dengan menggunakan kapal pengawas yang berada di wilayah kerja Stasiun Pengawasan SDKP Belawan yaitu sebagai berikut :

Tabel 28. Kapal Pengawas di Lingkup Stasiun Pengawasan SDKP Belawan

No	UPT/Satker	Tipe Kapal Pengawas	Kondisi
1	Stasiun PSDKP Belawan	Hiu 01	Baik
		Hiu 08	Baik
		Hiu 16	Baik
		Napoleon 028	Baik
		Dolphin 014	Dihapuskan

Data Kapal Pengawas Stasiun Pengawasan SDKP Belawan 2025

Pada tahun 2025 kegiatan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan dihadapkan pada kegiatan pengawasan sumber daya kelautan serta Penangkapan Ikan secara Terukur sehingga hal ini menuntut keberadaan sarana pengawasan berupa Kapal Pengawas dan Speedboat Pengawas yang selalu siap beroperasi. Sarana Pengawasan tersebut agar selalu dalam kondisi siap beroperasi maka perlu dilaksanakan perawatan pada tahun 2025. Perawatan pada Kapal Pengawas dapat digolongkan menjadi 3 jenis kegiatan perawatan, yaitu perawatan rutin bulanan, perawatan rutin tahunan, dan perawatan darurat. Telah dilaksanakan beberapa kegiatan perawatan untuk kapal pengawas maupun speedboat Lingkup Stasiun PSDKP Belawan diantaranya General Overhaul Gearbox KP Hiu 01, perawatan darurat Genset KP Hiu 16, perbaikan body kapal dan reling KP Hiu 08 serta Servis Alat Keselamatan KP Hiu 01 dan KP Hiu 08. Selain itu telah dilaksanakan kegiatan Docking Kapal Pengawas Hiu 16 yang dilaksanakan di galangan

PT. Palindo Marine di Batam. Untuk perawatan Speedboat di tahun 2025 telah dilaksanakan perbaikan Repowering Mesin Speedboat Napoleon 028 yaitu penggantian *Main Engine* dari Mercury menjadi Volvo Penta dengan tipe D4-270 DPH oleh PT. Jagad Mandiri Marine (PT.JMM) Jakarta. Kegiatan perawatan juga dilaksanakan untuk Speedboat Pengawas Dolphin 014 di Asahan berupa Docking dengan pekerjaan meliputi pendempulan dan pengecatan bagian luar body kapal serta perawatan darurat berupa perbaikan mesin.

Telah dilaksanakan kegiatan perawatan rutin berupa penggantian saringan hawa, pergantian filter BBM dan oli, kegiatan docking di atas air pada kapal SB. Napoleon 028. Kegiatan tersebut mencakup berbagai perbaikan dan pemeliharaan, antara lain pengecatan bodi kapal, perbaikan tempat duduk nakhoda serta personil kapal, pelapisan pasir pada lantai kapal, perbaikan reling bagian depan, dan perbaikan sistem buangan air pada pintu kamar mesin. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan keselamatan dan kenyamanan dalam navigasi serta memastikan kapal berfungsi dengan optimal selama operasional.



Gambar 9. Penggantian Lifecraft KP. Hiu 01



Gambar 10. Perawatan Rutin KP. Speedboat Napoleon 028



Gambar 11. Penggantian Overflow dan sensor BBM KP. Speedboat Napoleon 028



Gambar 12. Docking KP. Speedboat Napoleon 028

Realisasi operasional kapal pengawas yang berada di bawah Stasiun Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (SDKP) Belawan pada tahun 2025 mencerminkan upaya yang intensif dalam pengawasan terhadap aktivitas penangkapan ikan di wilayah perairan Indonesia. Stasiun PSDKP Belawan mendapatkan anggaran bahan bakar minyak (BBM) untuk kapal pengawas sebesar Rp. 6.444.450.000,- yang merupakan alokasi penting untuk mendukung kelancaran operasional. Dengan anggaran ini, seluruh kapal pengawas berhasil melakukan operasi sebanyak 174 hari hingga akhir Desember 2025, yang terdiri dari rincian sebagai berikut: KP Hiu 01 beroperasi selama 49 hari, KP Hiu 08 selama 44 hari, dan KP Hiu 16 selama 54 hari. Selain itu, realisasi operasional speedboat Napoleon 028 tercatat sebanyak 27 hari. Pencapaian ini menunjukkan upaya yang sistematis dan berkelanjutan dalam menjaga keberlanjutan sumber daya ikan, mencegah praktik penangkapan ikan ilegal, serta memastikan bahwa kegiatan perikanan dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk perlindungan ekosistem laut. Melalui pengawasan yang optimal, diharapkan akan tercipta kondisi yang kondusif bagi pengelolaan sumber daya kelautan yang berkelanjutan.

Berikut jumlah kapal perikanan yang telah diperiksa oleh kapal pengawas di lingkup kerja Stasiun Pengawasan SDKP Belawan yaitu :

Tabel 29. Kapal Perikanan yang telah Diperiksa oleh Kapal Pengawas Lingkup Kerja Stasiun Pengawasan SDKP Belawan tahun 2025

NO	UPT / Satker	Jumlah Kapal Yang Diperiksa	Dokumen		Ket
			Lengkap	Tidak Lengkap	
1	Stasiun PSDKP Belawan				
	a. KP. HIU 01	125	113	12	
	b. KP. HIU 08	125	115	10	
	c. KP. HIU 16	159	147	12	
	d. KP. SB. Napoleon 028	75	63	12	
Total		484	438	46	

Data Kapal Pengawas Stasiun Pengawasan SDKP Belawan 2025

Berdasarkan data yang tercantum dalam tabel di atas, empat unit kapal pengawas yang beroperasi di Stasiun Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Belawan telah melaksanakan pemeriksaan terhadap total 484 kapal perikanan yang beroperasi di wilayah kerjanya. Dari jumlah tersebut, hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa sebanyak 438 kapal telah memenuhi kriteria yang ditetapkan dan memiliki dokumen yang lengkap. Namun, terdapat 46 kapal lainnya yang tidak memenuhi syarat dokumen yang diharuskan.

Dari kategori kapal yang tidak memenuhi syarat, terdapat 3 kapal kapal ikan asing. Sesuai dengan ketentuan yang berlaku, ketiga kapal tersebut dilanjutkan ke tahap proses penyidikan untuk penegakan hukum yang lebih lanjut. Tindakan ini mencerminkan komitmen yang kuat dari Stasiun Pengawasan SDKP Belawan dalam melaksanakan fungsi pengawasan dan penegakan hukum di bidang perikanan. Selain itu, langkah ini juga menunjukkan upaya proaktif dalam mengatasi pelanggaran yang terjadi di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia.



Gambar 13. Dokumentasi Pemeriksaan Kapal di Laut (Patroli Speed Boat)

3.3 Peningkatan Operasional Pengawasan Sumber Daya Perikanan

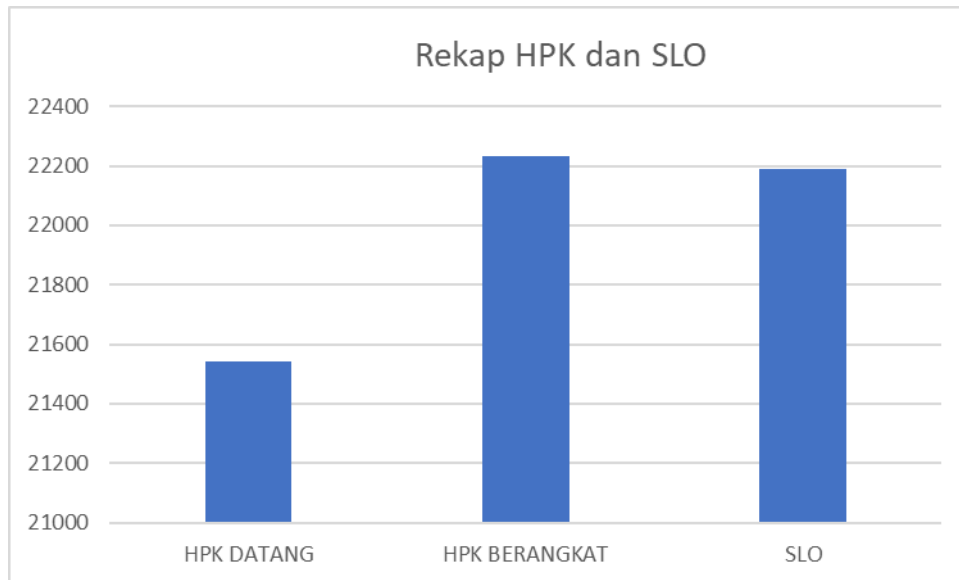
3.3.1 Pengawasan Kapal Perikanan

Pengawasan penangkapan ikan dilaksanakan dalam bentuk pemeriksaan kapal penangkap ikan dan kapal pengangkut hasil perikanan, yang dilakukan dengan cara pemeriksaan pada saat kedatangan kapal dan keberangkatan kapal.

Pemeriksaan meliputi pemeriksaan fisik dan dokumen kapal yang dituangkan pada form HPK D (Kedatangan), HPK B (Keberangkatan),

apabila sesuai dengan persyaratan maka diterbitkan SLO (Surat Laik Operasional).

Gambar 14. Rekapitulasi HPK di Lingkup Stasiun Pengawasan SDKP Belawan Tahun 2025



Data SDP Stasiun Pengawasan SDKP Belawan Tahun 2025

Data rekapitulasi HPK di setiap Satwas lingkup Stasiun Pengawasan SDKP Belawan dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 30. Rekapitulasi HPK lingkup Stasiun Pengawasan SDKP Belawan

No	UPT/Satker/Pos PSDKP	TOTAL		
		HPK		SLO
		D	B	
1	Stasiun PSDKP Belawan	3,102	2,987	2,987
2	Satwas PSDKP Rokan Hilir (Bagan Siapiapi)	150	191	191
3	Kabupaten Bengkalis	314	314	314
4	Kabupaten Kepulauan Meranti	48	53	53
5	Kabupaten Rokan Hilir (PANIPAHAN)	214	214	214
6	Wilayah Kerja PSDKP Kota Dumai	199	232	232
7	Satwas PSDKP Langsa	737	737	737
8	Kabupaten Aceh Timur	2,940	3,112	3,112
9	Kota Lhokseumawe	1,962	1,972	1,953
10	Kabupaten Bireuen (PEUDADA)	541	541	541

No	UPT/Satker/Pos PSDKP	TOTAL		
		HPK		SLO
		D	B	
11	Kabupaten Aceh Utara (Kreung Mane)	738	738	738
12	Kabupaten Pidie	518	518	518
13	Kabupaten Pidie Jaya	-	-	-
14	Satwas PSDKP Asahan	10,080	10,625	10,601
15	Kabupaten Batu Bara	-	-	-
JUMLAH		21,543	22,234	22,191

Data SDP Stasiun Pengawasan SDKP Belawan Tahun 2025

Berdasarkan tabel di atas yang dihitung secara berulang dalam tahun 2025 dapat diketahui bahwa kapal yang melaporkan kedatangannya berjumlah 21.543 kapal. Kapal yang melaporkan keberangkatannya sebanyak 22.234 kapal yaitu lebih banyak dibandingkan jumlah Surat Laik Operasi (SLO) yang keluar dikarenakan ada beberapa kapal yang telah dilakukan pemeriksaan akan tetapi tidak laik operasi.

Sedangkan jumlah unit kapal perikanan yang taat dalam melakukan operasi perikanan pada tahun 2025 lingkup Stasiun Pengawasan SDKP Belawan yaitu dengan melakukan serangkaian proses permohonan pemeriksaan melalui HPK Keberangkatan dan SLO adalah sebanyak 1.680 kapal dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 31. Kapal perikanan laik operasi lingkup Stasiun Pengawasan SDKP Belawan

No	UPT/Satker/Pos PSDKP	Jumlah Kapal
1	Stasiun PSDKP Belawan	273
2	Satwas PSDKP Rokan Hilir (Bagan Siapiapi)	14
3	Kabupaten Bengkalis	13
4	Kabupaten Kepulauan Meranti	7
5	Kabupaten Rokan Hilir (PANIPAHAN)	90
6	Wilayah Kerja PSDKP Kota Dumai	6
7	Satwas PSDKP Langsa	23
8	Kabupaten Aceh Timur	231
9	Kota Lhokseumawe	65
10	Kabupaten Bireuen (PEUDADA)	25
11	Kabupaten Aceh Utara (Kreung Mane)	21
12	Kabupaten Pidie	37

No	UPT/Satker/Pos PSDKP	Jumlah Kapal
13	Kabupaten Pidie Jaya	0
14	Satwas PSDKP Asahan	543
15	Kabupaten Batu Bara	0
JUMLAH		1.348

Data SDP Stasiun Pengawasan SDKP Belawan Tahun 2025



Gambar 15. Dokumentasi Pengawasan Kapal Perikanan Oleh Pengawas Perikanan

3.3.2 Pengawasan Usaha Budidaya Perikanan

Pada umumnya kegiatan pengawasan budidaya perikanan yang dilaksanakan di lingkup Stasiun Pengawasan SDKP Belawan yaitu pemeriksaan jenis kegiatan usaha, sarana produksi dan dokumen perizinan.



Gambar 16. Dokumentasi Pengawasan Unit Usaha Budidaya Oleh Pengawas Perikanan

UPT serta Satwas dan Wilker lingkup Stasiun Pengawasan SDKP Belawan telah melaksanakan kegiatan pengawasan usaha budidaya perikanan yang dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 32. Unit usaha budidaya yang diawasi Lingkup Kerja Stasiun Pengawasan SDKP Belawan Tahun 2025

No	UPT/Satker	Jumlah yang diawasi (Unit)	Jumlah yang memiliki NIB (Unit)
1	Stasiun Pengawasan SDKP Belawan	-	-
2	Satuan Pengawasan SDKP Langsa	1	-
3	Satuan Pengawasan SDKP Asahan	-	-
4	Satuan Pengawasan SDKP Rokan Hilir	2	-
5	WilkerPengawasan SDKP Lhokseumawe	-	-
6	Wilker IDI	-	-
7	WilkerPengawasan SDKP Dumai	-	-
Total		3	-

Data Pengawasan SDP Stasiun Pengawasan SDKP Belawan Tahun 2025

Unit usaha budidaya perikanan yang telah diawasi sebanyak 3 (tiga) unit. Dari 3 (tiga) unit tersebut tidak memiliki NIB.

Pada tahun 2025 pengawasan unit usaha budidaya ikan berdasarkan pendekatan perizinan berbasis resiko (*risk based licensing approach*, RBA), hal ini sesuai dengan amanah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Usaha Berbasis Risiko. Hal ini juga sesuai dengan Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha Dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Sektor Kelautan Dan Perikanan dimana pengawasan yang dilakukan oleh pengawas perikanan berdasarkan petunjuk teknis Direktur Jenderal PSDKP, Peraturan Direktur Jenderal PSDKP Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Petunjuk Teknis Pengawasan Usaha Dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Bidang Perikanan.

Pengawasan pembudidayaan ikan yang dilaksanakan dengan memeriksa beberapa kategori yaitu:

- a. Risiko menengah rendah (skala usaha mikro dan kecil)
 - 1) Keberadaan laporan kegiatan usaha (LKU);
 - 2) Keberadaan pernyataan mandiri (*self declare*) pemenuhan cara budidaya ikan yang baik.
- b. Risiko menengah tinggi (skala usaha menengah dan besar)
 - 1) Keberadaan laporan kegiatan usaha (LKU);
 - 2) Keberadaan sertifikat cara budidaya ikan yang baik dan/atau cara pembenihan ikan yang baik.

3.3.3 Pengawasan Distribusi Hasil Perikanan

Kegiatan pengawasan pelaku usaha subsektor Pengangkutan dan Pemasaran Ikan dilakukan berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.46/MEN/2014 tentang pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan yang masuk

ke dalam wilayah RI dan Peraturan Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Nomor 06 tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Pengawasan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Bidang Perikanan.

Kegiatan pengawasan pelaku usaha subsektor Pengangkutan Dan Pemasaran Ikan pada tahun 2025 di Stasiun Pengawasan SDKP Belawan menilai tingkat kepatuhan pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan usahanya dalam pelaksanaan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kelautan dan Perikanan, perlu mengatur mengenai teknis pengawasan perizinan berusaha berbasis risiko bidang perikanan.



Gambar 17. Dokumentasi Pengawasan Distribusi Hasil Perikanan Oleh Pengawas Perikanan

Kegiatan pengawasan pelaku usaha subsektor Pengangkutan dan Pemasaran Ikan pada tahun 2025 Stasiun Pengawasan SDKP Belawan dan lingkup Satwas SDKP Stasiun Pengawasan SDKP Belawan telah mengawasi 3 (tiga) pelaku usaha distribusi hasil perikanan, dalam hal ini yaitu pelaku impor dan ekspor ikan. Dari 3 (tiga) pelaku usaha yang telah dilakukan pemeriksaan, ditemukan dua pelaku usaha yang melakukan pelanggaran distribusi ketidaksesuaian peruntukkan impor ikan yaitu PT Artha Maju Gemilang dan CV Bahagia. Kepada dua unit usaha tersebut telah dikenakan sanksi administrasi berupa Surat Peringatan 1.

Rekapitulasi pelaku usaha yang sudah diawasi disajikan pada tabel berikut.

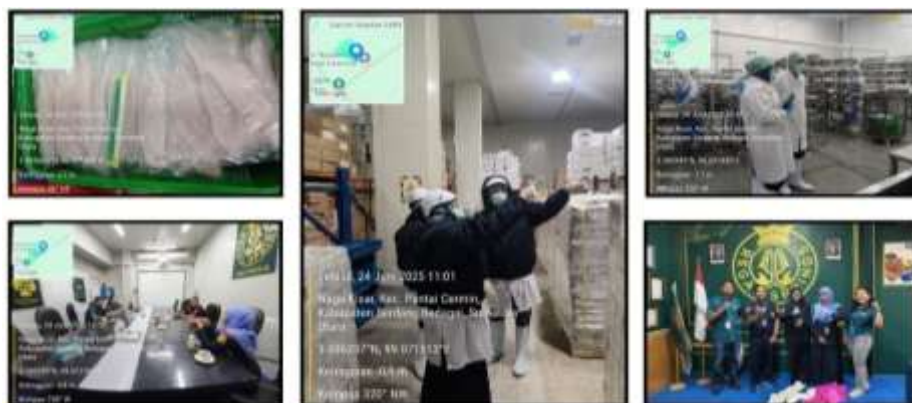
Tabel 33. Unit usaha objek pengawasan distribusi

No	Unit Usaha	Lokasi	Keterangan
1	PT. Zahid Imran International	Serdang Bedaga, Sumut	Tidak Ditemukan
2	PT. Artha Maju Gemilang	Medan, Sumut	Tidak Patuh
3	CV. Bahagia	Medan, Sumut	Tidak Patuh

Data Pengawasan SDP Stasiun Pengawasan SDKP Belawan Tahun 2025

3.3.4 Verifikasi Unit Pengolahan Ikan

Verifikasi unit pengolahan ikan dilakukan dengan melakukan pengawasan pada ketertiban dokumen-dokumen di perusahaan pengolahan ikan. Verifikasi unit pengolahan ikan yang telah dilaksanakan oleh lingkup Stasiun Pengawasan SDKP Belawan meliputi UPI skala besar dan UPI skala kecil.



Gambar 18. Dokumentasi Pengawasan Unit Pengolahan Ikan Oleh Pengawas Perikanan

Tahun 2025 Stasiun Pengawasan SDKP Belawan dan lingkup Satwas SDKP Stasiun Pengawasan SDKP Belawan telah mengawasi dua pelaku usaha. Dari 2 (dua) pelaku usaha yang telah diperiksa, seluruhnya telah memiliki kelengkapan perijinan berusaha. Rekapitulasi pelaku usaha yang sudah diawasi disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 34. Unit usaha objek pengawasan Unit Pengolahan Ikan

No	Unit Usaha	Lokasi	Keterangan
1	PT. Golden Seafood Indonesia	Sumatera Utara	Patuh
2	PT. Aqua Farm Nusantara	Sumatera Utara	Patuh

3.3.5 Pengawasan Jenis Ikan Dilindungi

Kegiatan Pengawasan Jenis Ikan Dilindungi dilakukan dengan melakukan pengawasan pada ketertiban dokumen-dokumen di perusahaan perdagangan maupun pembesaran jenis ikan dilindungi.



Gambar 19. Dokumentasi Pengawasan Jenis Ikan Dilindungi

Tahun 2025 Stasiun Pengawasan SDKP Belawan dan lingkup Satwas SDKP Stasiun Pengawasan SDKP Belawan telah mengawasi lima pelaku usaha. Dari 5 (lima) pelaku usaha yang telah diperiksa, terdapat 1 (satu) pelaku usaha tidak memiliki SIPJI. Rekapitulasi pelaku usaha yang sudah diawasi disajikan pada tabel berikut.

Tabel 35. Unit Usaha Objek Pengawasan Jenis Ikan Dilindungi

No	Unit Usaha	Lokasi	Keterangan
1	CV. Cahaya Sejahtera	Medan, Sumatera Utara	Patuh
2	CV. Sumber Lestari Alam	Pekanbaru, Riau	Tidak Patuh

No	Unit Usaha	Lokasi	Keterangan
3	PT. Sukses Arwana Sumarindo	Pekanbaru, Riau	Patuh
4	PT. Salmah Arowana Lestari	Pekanbaru, Riau	Patuh
5	CV. Riau Arwana	Pekanbaru, Riau	Patuh

Data Pengawasan SDP Stasiun Pengawasan SDKP Belawan Tahun 2025

3.4 Peningkatan Operasional Pengawasan Sumber Daya Kelautan

Kegiatan pengawasan sumber daya kelautan dilakukan berdasar Undang-Undang No.45 Tahun 2009 Revisi Undang-Undang No.31 Tahun 2004 Tentang Perikanan; Undang-Undang 01 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang No. 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.

Kegiatan Operasional Pengawasan Sumber Daya Kelautan Lingkup Stasiun Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Belawan adalah :

- a. Pengawasan Ruang Laut dilaksanakan terhadap 13 (Tiga Belas) pelaku usaha yaitu :
 - 1) PT Intibenua Perkasatama di jl. Raya Lubuk Gaung , Kec. Sungai Sembilan, Kota Dumai, Prov. Riau;
 - 2) PT Agro Murni di Jl. Ketam Putih, Kel. Tj. Penyembal, Kec. Sungai Sembilan, Kota Dumai, Prov. Riau;
 - 3) PT. Pertamina Patra Niaga di Jl. Samudera 1-2 Hageo Teungoh, Kota Lhoksumawe, Aceh;
 - 4) PT Semen Padang di Jl. Cut Nyak Dien, Kel. Bangsal Aceh, Kec. Sungai Sembilan, Kota Dumai, Riau,
 - 5) PT. PLN Indonesia Power di Desa Tanjung Pasir, Kec. Pangkalan Susu, Kab. Langkat, Sumatera Utara.

Dan seterusnya, selengkapnya dalam lampiran 8.

b. Pengawasan pencemaran perairan dilaksanakan di 2 (Dua) Unit Pengolahan Ikan (UPI) :

- 1) PT. Anugerah Alam Industri di l. Jala IV Nomor 32, Lingk. III, Kelurahan Rengas Pulau, Kecamatan Medan Marelan, Kota Medan;
- 6) PT. Seafood Samudera Pacific di Jl. Titi Pahlawan No. 38 Kelurahan Rengas Pulau Kecamatan Medan Marelan, Kota Medan.

Dan seterusnya, selengkapnya dalam lampiran 8.

c. Pengawasan Produk dan Jasa Kelautan di 7 (Tujuh) lokasi yaitu :

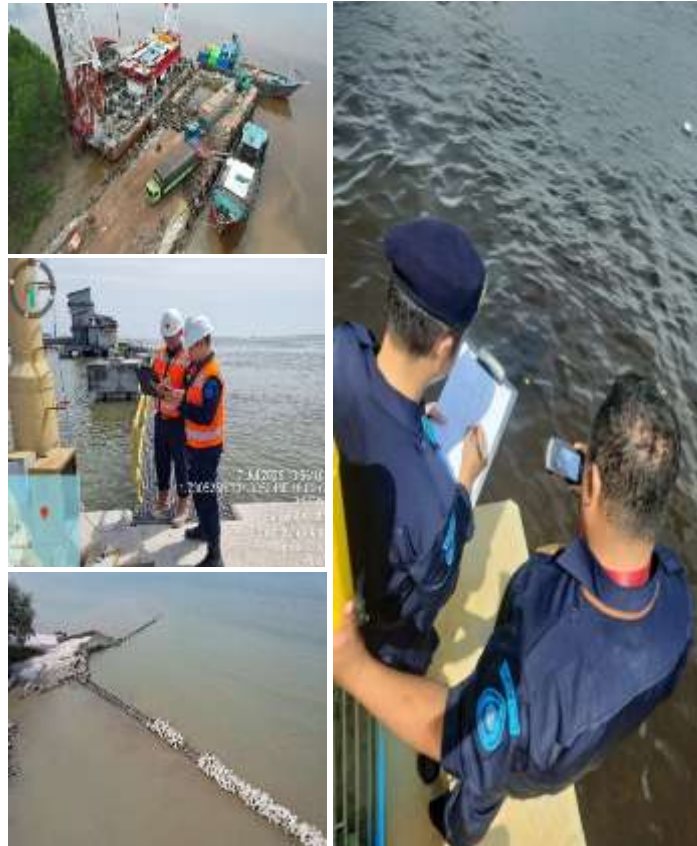
- 1) PT. Intibenua Perkasatama berada di Jalan Raya Lubuk Gaung, Desa/Kelurahan Lubuk Gaung, Kecamatan Sungai Sembilan, Kota Dumai, Provinsi Riau;
- 2) PT. Intibenua Perkasatama berada di Komplek Pelabuhan PELINDO, Jl. Datuk Laksamana, Kel. Buluh Kasap, Kec. Dumai Timur, Kota Dumai, Provinsi Riau;
- 3) PT Agro Murni berada di Jalan Ketam Putih, Kelurahan Tanjung Penyembal, Kecamatan Sungai Sembilan, Kota Dumai, Provinsi Riau;
- 4) PT Sari Dumai Sejati yang berada di Jalan Raya Lubuk Gaung, Kelurahan LubukGaung, Kecamatan Sungai Sembilan, Kota Dumai, Provinsi Riau;
- 5) PT Semesta Alam Permai yang berada di Jalan PU Lama, Kelurahan Lubuk Gaung, Kecamatan Sungai Sembilan, Kota Dumai, Provinsi Riau;
- 6) PT Pelita Agung Agrindustri yang beralamat di Jl. Datuk Laksamana, Komplek PelabuhanIndonesia (Persero) Regional 1 Dumai, Kelurahan Dumai Kota, Kecamatan Dumai Kota, Kota Dumai, Provinsi Riau;
- 7) PT KLK Dumai berada di Jl. Datuk Laksamana, Kawasan Pelindo I, Kelurahan Buluh Kasap, Kecamatan Dumai

Timur, Kota Dumai, Provinsi Riau.

Dan seterusnya, selengkapnya dalam lampiran 8.

- d. Kegiatan Pengumpulan Bahan dan Keterangan sebanyak 8 (delapan) kegiatan di Provinsi Aceh, Provinsi Sumatera Utara dan Provinsi Riau.

Pengawasan Pemanfaatan Ruang Laut



Gambar 20. Pengawasan PRL

Pengawasan Produk/Jasa Kelautan (Pemanfaatan Air Laut Selain Energi)



Gambar 21. Pengawasan Produk/Jasa Kelautan (Pemanfaatan ALSE)

Kegiatan Pengawasan Pencemaran



Gambar 22. Pengawasan Kegiatan Pencemaran

3.5 Penyelesaian Tindak Pidana Kelautan Dan Perikanan

Selama Tahun 2025 Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Stasiun Pengawasan SDKP Belawan telah melakukan proses penyidikan terhadap 3 (tiga) kasus kapal perikanan yang melakukan tindak pidana perikanan. Kapal tersebut merupakan Kapal Ikan Asing (KIA) berbendera Malaysia. Rekapitulasi penyidikan yang dilakukan oleh PPNS Perikanan Stasiun Pengawasan SDKP Belawan selama Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 36. Penyidikan yang Dilakukan Stasiun Pengawasan SDKP Belawan Tahun 2025

No.	Nama Kapal	Nama Tersangka	Kebangsaan Kapal	Kewarganegaraan tersangka	Tanggal Tertangkap	Perkembangan Perkara
1	KM SLFA 5210 GT 43,34	DWI PUTRA	Malaysia	Indonesia	26 Mei 2025	Inkracht
2	KM. SLFA 4584 GT 27,16	SAMSUL BAHRI	Malaysia	Indonesia	26 Mei 2025	Inkracht
3	KM. PKFB 1066 GT 50,09	THU RA KYAW	Malaysia	Myanmar	22 Juni 2025	Inkracht

Jenis kejahatan yang dilakukan oleh kapal ikan asing (KIA) adalah melakukan penangkapan ikan secara ilegal dengan menggunakan alat penangkap ikan terlarang Trawl di Perairan Teritorial dan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia tanpa memiliki Perizinan Berusaha dari Pemerintah Republik Indonesia. Dengan Pasal Sangkaan: Pasal 92 jo pasal 26 ayat (1), Pasal 98 jo pasal 42 ayat (3) Sektor Kelautan dan Perikanan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Pentapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-undang dan Pasal 85 jo Pasal 9 Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan.

BAB IV PERMASALAHAN DAN STRATEGI PEMECAHAN

4.1 Permasalahan

Dalam pelaksanaan kegiatan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan, permasalahan yang dihadapi oleh Stasiun Pengawasan SDKP Belawan Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

A. Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Perikanan

1. Masih terdapat pelaku usaha perikanan yang belum sepenuhnya patuh terhadap ketentuan perizinan berusaha berbasis risiko, khususnya pada usaha budidaya perikanan skala kecil, unit pengolahan ikan (UPI), dan distribusi hasil perikanan yang belum memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB), CBIB, maupun CPIB;
2. Sebagian pelaku usaha penangkapan ikan masih belum melakukan migrasi perizinan ke sistem pusat serta belum memasang Sistem Pemantauan Kapal Perikanan (SPKP) karena mempertimbangkan biaya pengadaan perangkat dan airtime yang dinilai cukup tinggi;
3. Belum tersedianya lokasi pendaratan ikan yang terpusat di Pelabuhan Perikanan Samudera (PPS) Belawan menyebabkan kegiatan bongkar hasil tangkapan tersebar di berbagai tangkahan swasta sehingga menyulitkan pengawasan pendaratan ikan oleh Pengawas Perikanan.;
4. Dalam pengawasan distribusi hasil perikanan masih ditemukan adanya ketidaksesuaian peruntukan impor ikan yang dipengaruhi oleh tingginya permintaan pasar pada saat hasil tangkapan nelayan menurun;

5. Keterbatasan jumlah pengawas perikanan di beberapa Satwas dan Wilker menyebabkan pelaksanaan pengawasan belum dapat menjangkau seluruh objek pengawasan secara optimal;
6. Masih terdapat pelaku usaha yang kurang memahami ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan sumber daya perikanan, sehingga tingkat kepatuhan terhadap administrasi dan operasional usaha belum maksimal.

B. Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Kelautan

1. Jumlah Polisi Khusus Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Polsus PWP3K) masih terbatas dan sebagian personel belum memiliki penetapan resmi sebagai dasar pelaksanaan tugas pengawasan sumber daya kelautan;
2. Masih terdapat pemanfaatan ruang laut eksisting oleh beberapa pelaku usaha dan instansi pemerintah yang belum memiliki Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (PKKPRL) atau KKPRL.;
3. Keterbatasan akses data dan informasi terkait status perizinan ruang laut menyebabkan pengawasan terhadap pemanfaatan ruang laut belum dapat dilakukan secara maksimal dan terintegrasi.;
4. Masih ditemukan pipa pengambilan air laut oleh pelaku usaha hatchery yang belum memiliki izin KKPRL sesuai ketentuan.;
5. Kurangnya pemahaman pelaku usaha terhadap tata ruang laut dan kewajiban perizinan menyebabkan masih ditemukannya pelanggaran administratif dalam pemanfaatan ruang laut dan jasa kelautan.;
6. Pengawasan terhadap kegiatan pemanfaatan sedimentasi laut dan aktivitas pemanfaatan ruang laut lainnya masih menghadapi kendala koordinasi lintas sektor dan keterbatasan regulasi operasional di lapangan.

C. Operasional Kapal Pengawas

1. Tingginya intensitas operasi pengawasan memerlukan dukungan anggaran operasional dan pemeliharaan sarana pengawasan yang besar, khususnya untuk kebutuhan BBM, docking, serta perawatan kapal pengawas dan speedboat;
2. Kondisi geografis wilayah kerja yang luas mencakup Provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan Riau menyebabkan pengawasan memerlukan dukungan sarana operasional yang memadai dan siap operasi setiap saat;
3. Belum tersedianya dermaga permanen khusus kapal pengawas di lingkungan Stasiun PSDKP Belawan menyebabkan keterbatasan tempat sandar kapal pengawas serta mengganggu kelancaran operasional pengawasan;
4. Sebagian sarana pengawasan memerlukan pemeliharaan rutin dan darurat agar tetap dalam kondisi laik operasi guna mendukung efektivitas patroli pengawasan di laut.

D. Penanganan Pelanggaran

1. Stasiun PSDKP Belawan belum memiliki dermaga khusus dan tempat penyimpanan barang bukti kapal hasil tangkapan sehingga penitipan barang bukti masih menggunakan fasilitas milik pihak ketiga/swasta;
2. Dalam proses penyidikan tindak pidana perikanan, sering ditemukan awak kapal asing yang tidak memiliki dokumen identitas resmi sehingga menyulitkan proses identifikasi tersangka maupun saksi;
3. Keterbatasan ketersediaan juru bahasa asing bersertifikat menjadi kendala dalam proses pemeriksaan dan penyidikan terhadap awak kapal asing;

4. Tingginya aktivitas illegal fishing di wilayah perairan Selat Malaka dan WPP 571 masih menjadi tantangan serius dalam upaya pengawasan dan penegakan hukum perikanan.

4.2 Strategi Pemecahan

Proses pemecahan masalah yang dihadapi oleh Stasiun Pengawasan SDKP Belawan harus dicarikan strategi pemecahannya agar kinerja Stasiun Pengawasan SDKP Belawan dapat menjadi instansi yang lebih baik. Untuk itu disusun langkah-langkah dalam penyusunan strategi pemecahan sebagai berikut :

A. Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Perikanan

1. Meningkatkan koordinasi dan kerja sama dengan Pemerintah Daerah Provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan Riau dalam pelaksanaan pengawasan perizinan berusaha berbasis risiko sesuai kewenangan masing-masing;
2. Melaksanakan sosialisasi dan pendekatan persuasif kepada pelaku usaha perikanan terkait pentingnya migrasi perizinan pusat dan pemasangan Sistem Pemantauan Kapal Perikanan (SPKP);
3. Berkoordinasi dengan PPS Belawan dan stakeholder terkait untuk mendorong tersedianya lokasi pendaratan ikan yang lebih terpusat dan mudah diawasi.;
4. Meningkatkan pengawasan distribusi hasil perikanan, khususnya terhadap kegiatan impor ikan agar sesuai dengan ketentuan dan peruntukannya;
5. Melaksanakan pembinaan dan sosialisasi kepada pelaku usaha budidaya, UPI, dan distribusi hasil perikanan mengenai kewajiban kepemilikan NIB, CBIB, CPIB, dan dokumen usaha lainnya;
6. Mengoptimalkan pengawasan berbasis risiko dan pemanfaatan teknologi informasi guna meningkatkan efektivitas pengawasan di wilayah kerja yang luas.

B. Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Kelautan

1. Mengusulkan penambahan dan penetapan personel Polsus PWP3K kepada Direktorat Jenderal PSDKP sebagai dasar legalitas pelaksanaan pengawasan sumber daya kelautan;
2. Meningkatkan koordinasi dengan Direktorat Pengawasan SDK, Pelindo, SKK Migas, serta instansi terkait lainnya dalam rangka pengawasan pemanfaatan ruang laut dan sinkronisasi data perizinan;
3. Melakukan pengumpulan data dan pengawasan terhadap pemanfaatan ruang laut eksisting yang belum memiliki PKKPR atau KKPR;
4. Meningkatkan edukasi dan sosialisasi kepada pelaku usaha terkait tata ruang laut dan kewajiban perizinan pemanfaatan ruang laut;
5. Melaksanakan pengawasan secara berkala terhadap kegiatan pemanfaatan air laut, pencemaran, dan jasa kelautan untuk memastikan kepatuhan pelaku usaha terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.

C. Operasional Kapal Pengawas

1. Mengoptimalkan penggunaan anggaran operasional dan pemeliharaan sarana pengawasan secara efektif dan efisien guna mendukung kesiapan operasi kapal pengawas dan speedboat;
2. Melaksanakan pemeliharaan rutin, docking, dan perawatan darurat sarana pengawasan agar seluruh armada selalu dalam kondisi siap operasi;
3. Mengusulkan pembangunan dermaga permanen kapal pengawas di lingkungan Stasiun PSDKP Belawan untuk mendukung efektivitas operasional pengawasan;
4. Memanfaatkan instalasi listrik darat sebagai upaya efisiensi penggunaan BBM dan mendukung operasional kapal pengawas yang lebih ramah lingkungan;
5. Meningkatkan koordinasi operasional patroli laut dengan instansi penegak hukum di laut seperti TNI AL, Polairud, dan Bakamla.

D. Penanganan Pelanggaran dan Penegakan Hukum

1. Mengusulkan pengadaan lahan dan pembangunan fasilitas penyimpanan barang bukti kapal hasil tangkapan untuk mendukung proses penegakan hukum;
2. Meningkatkan koordinasi dengan Kantor Imigrasi, Kepolisian, dan instansi terkait dalam proses identifikasi awak kapal asing yang tidak memiliki dokumen resmi.
3. Menjalinkan kerja sama dengan lembaga atau instansi yang memiliki juru bahasa asing bersertifikat guna mendukung proses penyidikan tindak pidana perikanan.
4. Meningkatkan kapasitas dan kompetensi PPNS Perikanan melalui pendidikan dan pelatihan teknis penyidikan, intelijen, dan penanganan tindak pidana kelautan dan perikanan.
5. Mengoptimalkan patroli pengawasan laut secara terpadu guna mencegah dan menindak praktik illegal fishing di wilayah kerja Stasiun PSDKP Belawan.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Stasiun Pengawasan SDKP Belawan tahun 2025 maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Penyerapan anggaran tahun 2025 dari pagu yang tersedia sebesar Rp. 28.996.148.000,- dapat terserap sebesar Rp. 26.422.679.177,- atau 92,19 %.
2. Stasiun Pengawasan SDKP Belawan melaksanakan koordinasi yang baik dengan instansi terkait dengan melakukan kegiatan yang bersifat eksternal dengan baik dan berkesinambungan serta stakeholder untuk mendukung efektivitas pengawasan di WPPNRI 571.
3. Pencapaian kinerja dan kegiatan pada Stasiun Pengawasan SDKP Belawan sudah memenuhi target.
4. Stasiun Pengawasan SDKP Belawan telah melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik dan mendukung pemerintah dalam rangka menciptakan tata pemerintahan yang baik (*good governance*),

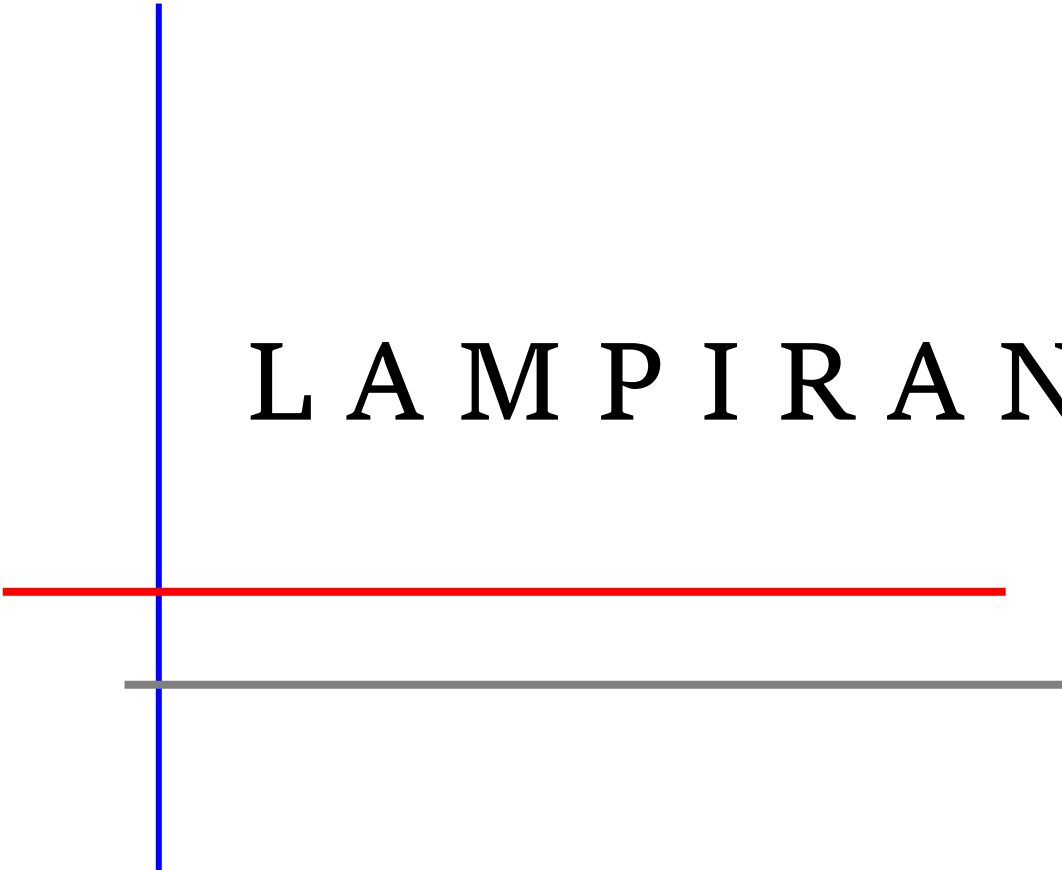
5.2 Saran

Adapun saran untuk pengembangan kelembagaan dan peningkatan kinerja Stasiun Pengawasan SDKP Belawan yaitu sebagai berikut :

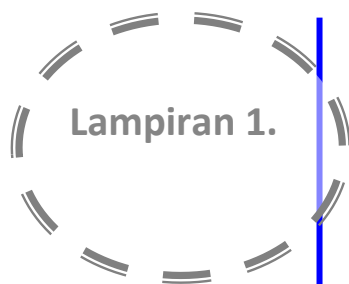
1. UPT lingkup Stasiun Pengawasan SDKP Belawan dalam melaksanakan kegiatan harus sesuai dengan Rencana Penarikan Dana (RPD);
2. Direktorat Jenderal Pengawasan SDKP dapat melakukan penilaian secara menyeluruh mengenai kinerja di Stasiun Pengawasan SDKP Belawan dan Satwas/Wilker dibawahnya sebagai acuan untuk melakukan perbaikan sehingga dapat menjadi instansi yang baik;
3. Perlunya melaksanakan sosialisasi peraturan perundang-undangan terhadap pelaku usaha budidaya perikanan dan pelaku usaha pengolahan ikan/distribusi hasil perikanan.

BAB VI PENUTUP

Laporan tahunan tahun 2025 ini merupakan sebuah pertanggungjawaban atas pelaksanaan program/kegiatan yang sudah berjalan. Dengan diselesaikannya laporan ini diharapkan menjadi sebuah penilaian bagi Stasiun Pengawasan SDKP Belawan agar dalam proses pelaksanaan program/kegiatan di kemudian hari dapat menjadi lebih baik. Kami menerima saran dan kritik yang membangun agar Stasiun Pengawasan SDKP Belawan menjadi Unit Pelaksana Teknis yang menerapkan prinsip-prinsip *good governance* dalam mendukung visi Kementerian Kelautan dan Perikanan dan misi Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan.



LAMP IRAN



**Struktur Organisasi Stasiun Pengawasan SDKP
Belawan Tahun 2025**

KEPALA STASIUN PSDKP BELAWAN
Muhamad Syamsu Rokhman, S.Pi, M.H

Mujtaba Umar Nasution, SE

1. Anwar Harahap, S.Sos (Laporan SKM)
2. Rina Puspa Sari, S.Tr.Pi (Laporan SKM)
2. Zulkarnain Nasution (SLO)
3. Adhi Kurniawan, S.Pi (LVHPI)
4. Ira Gustiana, S.Pi (laporan Pengaduan masyarakat)

1. Adhi Kurniawan, S.Pi
2. Didit Aditya, S.Tr.Pi
3. Retno Adiarti, S.Kel
4. Sila Szali, S.Pi
5. Irfan Dani Syahputra, S.Kom
6. Indraprastha Cahya Ambara T.S.Pi,
M.Ling

1. Graha Akbar Lingga, SE
2. Nur Baety A, S.tr.Pi
3. Abdullah Ali H Nasution, S.Pi
4. Zahra Rasyid, S, Pi, M.S.E

1. Zahra Rasyid, S.Pi, M.S.E
2. Desy Natalia, A.Md
3. Para Penanggungjawab Kegiatan/Koordinator

1. Afrinadewi, S.P
2. Vina Indriani, A.Md (operator Simpeg, SKP)
3. Maysarah PS,S.Pi (Admin Kepegawaian)
4. Gian Ginanjar (Persuratan/Kearsipan)
5. Natasya Fitrianda, A.Md (Sekretaris)

1. Siti Safiera, SE (Bendahara)
2. Afrinadewi (Bendahara Gaji)
3. Arya Rocky Damanik, SE (operator GLP/, PIPK)
4. Nur Baety Alfiani, S.Tr.Pi (admin SPIP)
5. Juli Sasmita Sari, SS (admin keuangan)
6. Asmaul Husna, S.Kel (Admin keuangan)
7. Lili Afriyanti, SE (admin keuangan)
8. Anwar Harahap, S.Sos (Operator SABMN, BPJS)
9. Indra Gunawan, S.Kom

Muhammad Iqbal	
H	Petugas Kemananan (SATPAM)

1. Fitra Yusuf	Petugas Kebersihan
2. Rusmin	Petugas Kebersihan
3. Desi Eriyanti	Pramubakti/Keperluan Kantor
4. Muhadi, SE	Pengemudi
5. Rio Sakti	Pengemudi

Jefri Silalahi, S.Pi

1. Abdullah Ali Nasution, S.Pi (PPK)
2. Zahra Rasyid, S.Pi, M.S.E (PPK)
3. Fitri Zuliana, S.Pi, MMA (Aplikasi RUP)

1. Halimah Thussaddiyah, S.St.Pi
2. Desy Natalia, A.Md

1. Rinondang Panggabean, S.St.Pi
2. Ach Muttaqin, A.Md
3. Muhammad Iqbal
4. Syahrul Pradana
5. Muhammad Teguh Simanjuntak

1. Tupa P Sitanggang,S.Pi (Koordinator)
2. Zulkarnain N,S.St.Pi (Wa. Koordinator)
3. Seluruh Jabfung Pengawas Perikanan

**SATUAN PENGAWASAN SUMBER
DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN**

Tupa Prosasdi Sitanggang, S.Pi

1. Zulkarnain Nasution, S.St.Pi
2. Nur Baety Alifiani, S.Tr.Pi
3. Asmaul Husna, S.Kel
4. Rina Puspa Sari, S.Tr.Pi
5. Ira Gustiana, S.Pi
6. Retno Adiarti, S.Kel
7. Seluruh Pengawas Perikanan (piket)

1. Adhi Kurniawan, S.Pi
2. Seluruh Pengawas Perikanan

1. Adhi Kurniawan,S.Pi
2. Seluruh Pengawas Perikanan

1. Fitri Zuliana, S.Pi, MMA
2. Seluruh Pengawas Perikanan

Muhammad Iqbal, S.Pi

1. Muhamad Iqbal, S.Pi
2. Muhammad Fahrul Riza, S.I.K
3. Ach Muttaqin, A.Md
4. Rihat Hutahayan, A.Md.Pi
5. Muhammad Iqbal (B)
6. Rifka Ade Shinta, S.Tr.Pi
7. Asmaul Husna, S.Kel

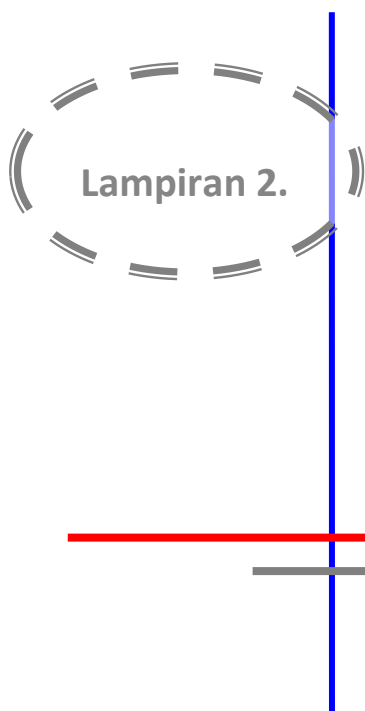
Josia Suarta Sembiring, SH

1. Josia Sembiring,SH,MH
2. Denggan M. Ilmi , S.Pi, MH
3. Zulkarnain Nasution, S.St.Pi
4. Tupa P Sitanggang, S.Pi
5. Inggrika RE Kaban, S.Pi, M

1. Tupa P Sitanggang, S.Pi
2. Zulkarnain Nasution, S.St.Pi
3. Dengan M Ilmi, S.Pi
4. Didit Aditya, S.Tr.Pi
5. Siti Zubaidah


 Belawan, 3 Januari 2025
 Kepala Stasiun Pengawasan Sumber Daya
 Kelautan dan Perikanan Belawan

Muhamad Syaitsu Rokhman, S.Pi, M.H
 Pengawas Sumber Daya Kelautan dan Perikanan
 08303730 200801 1 003



Lampiran 2.

**Persuratan Lingkup Stasiun Pengawasan Sumber
Daya Kelautan dan Perikanan Belawan Tahun 2025**

Lamp. 2. Persuratan Lingkup Kerja Stasiun Pengawasan SDKP Belawan Tahun 2025

No	UNIT KERJA		PERSURATAN												Jml
			Jan	Feb	Mar	Aprl	Mei	Jun	Jul	Ags	Sept	Okt	Nov	Des	
1	Stasiun PSDKP Belawan	Surat Masuk	129	90	115	76	203	126	166	123	126	103	130	142	1529
		Surat Keluar	239	213	93	111	203	254	229	148	319	192	187	375	2563
		SPT	41	47	19	37	92	85	102	109	49	51	84	105	821
2	Satuan Pengawasan SDKP Asahan	Surat Masuk	1	2	1	1	0	1	1	3	0	13	4	9	36
		Surat Keluar	11	3	9	1	10	6	1	2	13	-	2	3	61
3	Satuan Pengawasan SDKP Langsa	Surat Masuk	5	4	4	5	7	3	4	5	4	4	4	6	55
		Surat Keluar	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1
4	Satuan Pengawasan SDKP Rokan Hilir	Surat Masuk	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	3
		Surat Keluar	0	0	1	0	0	0	2	0	0	4	0	5	12



**Komposisi Pegawai Stasiun Pengawasan SDKP
Belawan Tahun Anggaran 2025**

Lampiran 3. Komposisi Pegawai Stasiun PSDKP Belawan T.A 2025

No	Unit kerja	Jumlah Pegawai (orang)						Total	%
		Pegawai/Pengawas Perikanan							
		PNS	AWAK KP	PPPK	PPNPN + PJLP	Dinas			
1	Stasiun PSDKP Belawan	28	21	20	22	-	91	70,54	
2	Satwas SDKP Langsa	7	-	1	4	-	12	9,30	
3	Satwas SDKP Asahan	5	-	3	5	1	14	10,85	
4	Satwas SDKP Rokan Hilir	8	-	1	3	-	12	9,30	
Total		48	21	25	34	1	129	100,00	



Lampiran 4.

**Daftar Nama Pegawai Lingkup Stasiun Pengawasan
SDKP Belawan tahun 2025**

Lampiran 4. Daftar Nama Pegawai Lingkup Stasiun Pengawasan SDKP Belawan Tahun 2025

1. STASIUN PENGAWASAN SDKP BELAWAN

NO.	NAMA	NIP	PANGKAT/ GOL	JABATAN	STATUS KEPEGAWAIAN	Pendidikan
1	Muhamad Syamsu Rokhman, S.Pi, M.H	19830730 200801 1 003	Penata Tk.I / III-d	Kepala	PNS	S-2
2	Adhi Kurniadi, S.St.Pi	19860712 200901 1 003	Penata Tk.I / III-d	Ketua Tim Kerja Prasarana, Sarana dan Operasi Kapal Pengawas / Pengawas Perikanan Ahli Muda	PNS	D-IV
3	Sirman Rajagukguk, S.Pi, M.Sc	19820626 200912 1 002	Penata Tk. I / III-d	Ketua Tim Kerja Intenjen dan Pengawasan Sumber Daya Kelautan / Pengawas Perikanan Ahli Muda	PNS	S-2
4	Tupa Prosasdi Sitanggang, S.Pi	19790217 200912 1 001	Penata Tk.I / III-d	Ketua Tim Kerja Penanganan Pelanggaran / Pengawas Perikanan Ahli Muda	PNS	S-1
5	Edy Sutanto, S.Pi	19761222 200912 1 001	Penata Tk.I/ III-d	Ketua Tim Kerja Dukungan Manajerial / Kepala Urusan Umum	PNS	S-1
6	Josia Suarta Sembiring, S.H, M.H	19860603 200912 1 001	Penata / III-c	Ketua Tim Kerja Intenjen dan Pengawasan Sumber Daya Perikanan / Pengawas Perikanan Ahli Pertama	PNS	S-2
7	Zahra Rasyid, S.Pi, M.S.E	19860523 200804 2 001	Pembina / IV-a	Analisis Pengawasan SDKP	PNS	S-2
8	Zulkarnain Nasution, S.St.Pi	19861021 201012 1 003	Penata Tk.I / III-d	Pengawas Perikanan Ahli Muda	PNS	D-IV
9	Adhi Kurniawan, S.Pi	19870403 201012 1 004	Penata Tk.I / III-d	Pengawas Perikanan Ahli Muda	PNS	S-1
10	Inggrika R.E.K, S.Pi, MMarScMgt	19870714 201012 2 002	Penata Tk.I / III-d	Pengawas Perikanan Ahli Muda	PNS	S-2
11	Fitri Zuliana, S.Pi, MMA	19820724 200912 2 002	Penata Tk.I / III-d	Pengawas Perikanan Ahli Muda	PNS	S-2
12	Indraprastha C.T, S.Pi	19850917 201012 1 001	Penata Tk.I / III-d	Pengawas Perikanan Ahli Muda (TUBEL)	PNS	S-1
13	Denggan Muhammad Ilmi, S.Pi, M.H	19840401 200912 1 002	Penata Tk.I / III-d	Pengawas Perikanan Ahli Muda	PNS	S-2
14	Jefri Silalahi, S.Pi	19760122 200912 1 001	Penata Tk.I / III-d	Pengawas Perikanan Ahli Muda	PNS	S-1
15	Anwar Harahap, S.Sos	19840807 201503 1 001	Penata / III-c	Analisis Pelayanan	PNS	S-1
16	Mujtaba Umar Nasution, SE	19870922 201503 1 001	Penata / III-c	Analisis Perencanaan	PNS	S-1
17	Arya Rocky A Damanik, SE	19820921 201503 1 001	Penata / III-c	Analisis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Pertama	PNS	S-1
18	Abul Hayyi Almufrodi, S.Pi	19881204 201503 1 002	Penata / III-c	Pengawas Perikanan Ahli Pertama	PNS	S-1
19	Halimah Thussaddiyah, S.St.Pi	19870126 201503 2 003	Penata Muda Tk.I / III-b	Pengawas Perikanan Ahli Pertama	PNS	D-IV
20	Siti Safiera, SE, M.Si	19870731 201012 2 005	Penata Muda Tk.I / III-b	Pengelola Keuangan APBN Mahir	PNS	S-2
21	Vina Indriani De Saire, A.Md	19890202 201101 2 009	Penata Muda Tk.I / III-b	Pengolah Data	PNS	D-3
22	Abdullah Ali Hakim Nasution, S.Pi	19870902 201902 1 003	Penata Muda Tk.I / III-b	Pengawas Perikanan Ahli Pertama	PNS	S-1
23	Nur Baety Alifiani, S.Tr.Pi	19960921 202203 2 001	Penata Muda, III/a	Pengawas Perikanan Ahli Pertama	PNS	D-IV
24	Afrinadewi	19920402 201012 2 001	Pengatur Tk.I / II-d	Pengelola Keuangan	PNS	SUPM
25	Desy Natalia, A.Md	19911229 201902 2 007	Pengatur Tk.I / II-d	Asisten Pengawas Perikanan Terampil	PNS	D-3
26	Achmad Muttaqin, A.Md	19870326 201902 1 005	Pengatur Tk.I / II-d	Operator Speed Boat	PNS	D-3
27	Chaidi Rindiawati, A.Md.Pi	19990724 202203 2 002	Pengatur / II-c	Asisten Pengawas Perikanan Terampil	PNS	D-3
28	Muhammad Iqbal	19991117 202203 1 001	Pengatur Muda / II-a	Operator Speed Boat	PNS	SUPM
29	Asmaul Husna, S. Kel	19921025 202321 2 038	IX	Pengawas Perikanan Ahli Pertama	PPPK	S-1
30	Didit Aditya, S.Tr.Pi	19920616 202321 1 023	IX	Pengawas Perikanan Ahli Pertama	PPPK	D-IV
31	Retno Adiarti, S.Kel	19910822 202321 2 046	IX	Pengawas Perikanan Ahli Pertama	PPPK	S-1
32	Rina Puspa Sari, S.Tr.Pi	19910923 202321 2 042	IX	Pengawas Perikanan Ahli Pertama	PPPK	D-IV

90	Sri Kartaharja, S.Pi	19801223 201407 1 001	Penata / III-c	Pengolah Data	PNS	S-1
91	Sila Sazali, S.Pi	19860602 201407 1 001	Penata / III-c	Pengelola Surat	PNS	S-1
Wilker PSDKP Indragiri Hilir						
92	Hardiansyah, A.Md	19860412 200903 1 005	Penata Muda / III-a	Pengolah Data	PNS	D-3
93	Wahyuri Purnamasari, A.Md	19800915 201407 2 007	Pengatur Tk.I / II-d	Pengelola Keuangan	PNS	D-3

5. KAPAL PENGAWAS HIU 01

NO.	NAMA	NIP	PANGKAT/ GOL	JABATAN	TATUS KEPEGAWAIAN	Pendidikan
94	Fauzi Nyinga Mura, A.Md	19810916 200502 1 001	Penata / III-c	Nakhoda	PNS	D-3
95	Oktafiandi Fajrin, S.P	19881026 200901 1 001	Penata Muda, III/a	Mualim	PNS	S-1
96	Nurholis	19870915 200701 1 004	Penata Muda, III/a	Markonis	PNS	SUPM
97	Alfian Rio Susanto, S.St.Pi	19881214 201503 1 002	Penata / III-c	KKM	PNS	D-IV
98	Muhammad Iqbal	19870628 200701 1 003	Penata Muda, III/a	Masinis	PNS	SUPM
99	Budi Setiawan Pangaribuan	19880927 200801 1 001	Penata Muda, III/a	Serang	PNS	SMK
100	Abdiyullah, A.Md	19940813 202321 1 016	VII	Juru Mudi	PPPK (PANGKALAN LAMPULO)	D-3
101	Indra Dwi Cahyo	19930505 201801 1 002	Pengatur Muda Tk.I / II-b	Oiler I	PNS	SUPM
102	Candra Nurdiansyah	19910429 202203 1 001	Pengatur Muda / II-a	Oiler II	PNS	SUPM
103	Sudariyanto	19861026 202321 1 014	V	Kelasi I	PPPK	SMA
104	Muhammad Budi Indra Purnama	19890528 202321 1 014	V	Kelasi II	PPPK	SUPM
105	Abdul Haris	TKP	-	Juru Masak	TKP (Dit.POA)	SMA

6. KAPAL PENGAWAS HIU 08

NO.	NAMA	NIP	PANGKAT/ GOL	JABATAN	TATUS KEPEGAWAIAN	Pendidikan
106	Susanto Manggopa, A.Md, S.P	19831008 200604 1 003	Penata / III-c	Nakhoda	PNS	S-1
107	Bahrudin, S.PKP	19881223 200801 1 001	Penata Muda Tk.I/ III-b	Mualim	PNS	S-1
108	Riko Putra S, S.St.Pi	19880322 202321 1 011	Penata Muda, III/a	Markonis	PPPK (PANGKALAN TUAL)	D-IV
109	Jensson, S.St.Pi	19871111 201403 1 001	Penata / III-c	KKM	PNS	D-IV
110	Mashuri	19840503 200701 1 002	Penata Muda, III/a	Masinis	PNS	SUPM
111	Gustiya Dwi Laksono, A. Md	19930805 202012 1 003	Pengatur / II-c	Serang	PNS	D-3
112	Reza Jesia Pratama, A.Md.Pi	19980113 202421 1 001	Pengatur / II-c	Juru Mudi	PPPK (PANGKALAN BATAM)	D-3
113	Taufik Ismail	20000220 201902 1 002	Pengatur Muda Tk.I / II-b	Oiler I	PNS	SMK
114	Rifki Afrilian	19880416 202421 1 003	Pengatur Muda Tk.I / II-b	Oiler II	PPPK (PANGKALAN BATAM)	SMA
115	Syahrul Ishak	19860828 202321 1 015	V	Kelasi I	PPPK	SUPM
116	Yul Harisman	19900614 202321 1 019	V	Kelasi II	PPPK	SMA
117	Deri Gusrianto	TKP	-	Juru Masak	TKP (Dit.POA)	SMA

6. KAPAL PENGAWAS HIU 16

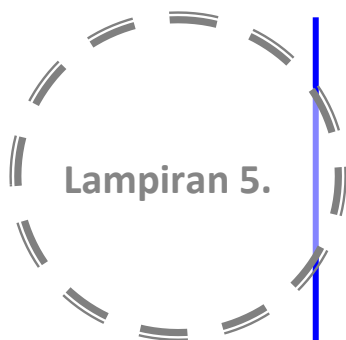
NO.	NAMA	NIP	PANGKAT/ GOL	JABATAN	TATUS KEPEGAWAIAN	Pendidikan
118	Albert Essing, A.Md., S.PKP	19800406 200604 1 007	Penata / III-c	Nakhoda	PNS	S-1
119	Neru Purnawan, A.Md, S.Tr.Pi	19871207 201403 1 001	Penata / III-c	Mualim	PNS	D-IV
120	Dhidit Setiawan	19840822 200502 1 001	Penata Muda, III/a	Markonis	PNS	SMK
121	Marthy Arny Toemigoloeng, A.Md., S.PKP	19790312 200604 1 002	Penata / III-c	KKM	PNS	S-1
122	Nurhaidir Malik, A.Md	19861219 201801 1 001	Pengatur Tk.I / II-d	Masinis I	PNS	D-3
123	Siswo Wijanarko, A.Md	19830408 201503 1 002	Penata Muda, III/a	Masinis II	PNS	D-3
124	Anton Sukrida	19790528 200901 1 004	Pengatur Tk.I / II-d	Serang	PNS	SUPM
125	Muhammad Nazri, A.Md	19911225 202321 1 011	VII	Juru Mudi	PPPK (PANGKALAN LAMPULO)	D-3
126	Frando Pangkey, A.Md	19850810 202321 1 021	VII	Oiler I	PPPK (PANGKALAN BATAM)	D-3
127	Achmad Fardianzah Nasution	20000125 202321 1 001	V	Kelasi I	PPPK (PANGKALAN LAMPULO)	SMA
128	Efendi Silasi Nainggolan	TKP	-	Oiler II	TKP (Dit.POA)	SMA
129	Nuriman	TKP	-	Juru Masak	TKP (Dit.POA)	SMA

Kepala Stasiun Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Belawan



Muhamad Syamsu Rokhman, S.Pi, M.H

NIP. 19830730 200801 1 003



Kenaikan Gaji Berkala Tahun 2025

Lampiran 5.

**KENAIKAN GAJI BERKALA
TAHUN 2025**

BULAN		NAMA PEGAWAI	GOLONGAN	KETERANGAN
Januari				
	1	Adhi Kurniadi, S.St.Pi	III-d	KGB mulai tanggal 1 Januari 2025
	2	Vina Indriani De Saire, A.Md	III-b	KGB mulai tanggal 1 Januari 2025
	3	Bahrudin	III-b	KGB mulai tanggal 1 Januari 2025
	4	Budi Setiawan Pangaribuan	III-a	KGB mulai tanggal 1 Januari 2025
	5	Wahyuri Purnamasari, A.Md	II-d	KGB mulai tanggal 1 Januari 2025
	6	Nurhaidir Malik	II-d	KGB mulai tanggal 1 Januari 2025
	7	Indra Dwi Cahyo	II-a	KGB mulai tanggal 1 Januari 2025
	8	Kelvin Ramadhan	II-b	KGB mulai tanggal 1 Januari 2025
Februari				
	1	Fauzi Nyinga Mura, A.Md	III-c	KGB mulai tanggal 1 Februari 2025
	2	Abdullah Ali Hakim Nasution, S.Pi	III-b	KGB mulai tanggal 1 Februari 2025
	3	Desy Natalia, A.Md	II-d	KGB mulai tanggal 1 Februari 2025
Maret				
	1	Alfian Rio Susanto	III-c	KGB mulai tanggal 1 Maret 2025
	2	Siswo Wijanarko	III-a	KGB mulai tanggal 1 Maret 2025
	3	Abul Hayyi Almufrodi, S.Pi	III-c	KGB mulai tanggal 1 Maret 2025
	4	Perkasa Sembiring, S.Pi	III-c	KGB mulai tanggal 1 Maret 2025
	5	Arya Rocky A Damanik, SE	III-c	KGB mulai tanggal 1 Maret 2025
	6	Anwar Harahap, S.Sos	III-c	KGB mulai tanggal 1 Maret 2025
	7	Mujtaba Umar Nasution, SE	III-c	KGB mulai tanggal 1 Maret 2025
	8	Hardiansyah, A.Md	III-a	KGB mulai tanggal 1 Maret 2025
	9	Candra Nurdiansyah	II-a	KGB mulai tanggal 1 Maret 2025
	10	Muhammad Iqbal	II-a	KGB mulai tanggal 1 Maret 2025
	11	Hendri Hamzah, A.Md	III-c	KGB mulai tanggal 1 Maret 2025
Mei				
	1	Muhammad Fahrul Riza, S.I.K	III-b	KGB mulai tanggal 1 Mei 2025
Oktober				
	1	Achmad Muttaqin, A.Md	II-d	KGB mulai tanggal 1 Oktober 2025
Desember				
	1	Afrinadewi	III-a	KGB mulai tanggal 1 Desember 2025
	2	Jefri Silalahi, S.Pi	III-d	KGB mulai tanggal 1 Desember 2025
	3	Hartoto, S.Pi	III-d	KGB mulai tanggal 1 Desember 2025
	4	Josia Suarta Sembiring, S.H	III-c	KGB mulai tanggal 1 Desember 2025
	5	Tupa Prosasdi Sitanggang, S.Pi	III-d	KGB mulai tanggal 1 Desember 2025
	6	Fitri Zuliana, S.Pi, M.M.A	III-d	KGB mulai tanggal 1 Desember 2025
	7	Denggan Muhammad Ilmi, S.Pi	III-d	KGB mulai tanggal 1 Desember 2025



**Daftar Nama PPNS Lingkup Stasiun Pengawasan
SDKP Belawan tahun 2025**

Lampiran 6. Daftar Nama (PPNS) Lingkup Stasiun Pengawasan SDKP Belawan

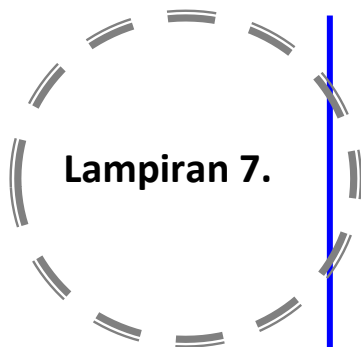
No.	Nama / NIP. / Tempat / Tgl. Lahir	Pangkat Gol. Dan Jabatan	Tgl. Pelatihan	Pelaksana Diklat	S.KEP PPNS	S.Kep Wil. Kerja PPNS
					No. / Tgl	
Stasiun Pengawasan SDKP Belawan						
1	Muhamad Syamsu Rokhman, S.Pi, M.H	Pembina / IV-a	21 September s/d	Pusdik Reskrim POLRI	AHU-462.AH.09.02	Seluruh Indonesia
	NIP. 19830730 200801 1 003	Kepala Stasiun PSDKP	19 November 2010	Mega Mendung	Tahun 2017	
	Rembang, 30 Juli 1983	Belawan			6 Juli 2017	
2	Josia Suarta Sembiring, S.H, M.H	Penata / III-c	29 April s/d	Pusdik Reskrim POLRI	AHU-34.AH.09.01	Seluruh Indonesia
	NIP.19860603 200912 1 001	Pengawas Perikanan Ahli Muda	27 Juni 2014	Mega Mendung	Tahun 2014	
	Medan, 3 Juni 1986				25 Agustus 2014	
3	Denggan M Ilmi, S.Pi, M.H	Penata Tk.I / III-d	29 April s/d	Pusdik Reskrim POLRI	AHU-34.AH.09.01	Seluruh Indonesia
	NIP.19840401 200912 1 002	Pengawas Perikanan Ahli Muda	27 Juni 2014	Mega Mendung	Tahun 2014	
	Medan, 1 April 1984				25 Agustus 2014	
4	Tupa Prosasdi Sitanggang, S.Pi	Penata Tk.I / III-d	13 April s/d	Pusdik Reskrim POLRI	AHU-56.AH.09.01	Seluruh Indonesia
	NIP.19790217 200912 1 001	Pengawas Perikanan Ahli Muda	12 Juni 2015	Mega Mendung	Tahun 2015	
	Samosir, 17 Februari 1979				02 November 2015	
5	Zulkarnain Nasution, S.St.Pi, M.Pi	Penata Tk.I / III-d	6 Maret s/d	Pusdik Reskrim POLRI	AHU-24.AH.09.01	Seluruh Indonesia
	NIP.19861021 201012 1 003	Pengawas Perikanan Ahli Muda	4 Mei 2018	Mega Mendung	Tahun 2018	
	Tarlola Mandailing Natal, 21 Oktober 1986				23 Agustus 2018	
6	Abul Hayyi Almufrodi, S.Pi, M.Si	Penata / III-c	24 Mei s/d	Pusdik Reskrim POLRI	AHU-8.AH.09.01	Seluruh Indonesia
	NIP. 19881204 201503 1 002	Pengawas Perikanan Ahli Muda	23 Juli 2021	Mega Mendung	Tahun 2021	
	Lumajang, 04 Desember 1988				03 Desember 2021	
Satuan Pengawasan SDKP Asahan						
7	Hartoto,S.Pi	Penata Tk.I / III-d	13 April s/d	Pusdik Reskrim POLRI	AHU-56.AH.09.01	Seluruh Indonesia
	NIP. 19850210 200912 1 002	Pengawas Perikanan Ahli Muda	12 Juni 2015	Mega Mendung	Tahun 2015	
	PulauRajaAfdIIIASahan, 10 Februari 1985				02 November 2015	
Satuan Pengawasan SDKP Langsa						
8	Askari, S.Pi	Penata Tk.I / III-d	20 Agustus s/d	Pusdik Reskrim POLRI	AHU-36.AH.09.01	Seluruh Indonesia
	NIP. 19790308 200604 1 007	Koordinator Satwas SDKP	18 Oktober 2013	Mega Mendung	Tahun 2013	
	Aceh Timur, 8 Maret 1979	Langsa / Analisis SDKP			27 Desember 2013	
9	Dia Murthala, S.St.Pi	Penata Tk.I / III-d	24 Mei s/d	Pusdik Reskrim POLRI	AHU-8.AH.09.01	Seluruh Indonesia
	NIP. 19821017 201003 1 001	Penata Perizinan Ahli muda	23 Juli 2021	Mega Mendung	Tahun 2021	
	Julok Cut, 17 Oktober 1982				03 Desember 2021	



Medan, 10 Januari 2025
Kepala Stasiun Pengawasan Sumber Daya
Kelautan dan Perikanan Belawan

MUHAMAD SYAMSU ROKHMAN, S.Pi, M.H

NIP. 19830730 200801 1 003



Pengawasan Sumber Daya Perikanan Tahun 2025

7. PENGAWASAN PENGELOLAAN SUMBER DAYA PERIKANAN

7.1. REKAPITULASI KEDATANGAN DAN KEBERANGKATAN KAPAL PERIKANAN S/D BULAN DESEMBER 2025

No	UPTI/Satker/Pos PSDKP	JANUARI									FEBRUARI								
		E - PIT			NON PIT			JUMLAH			E - PIT			NON PIT			JUMLAH		
		HPK		SLO	HPK		SLO	HPK		SLO	HPK		SLO	HPK		SLO	HPK		SLO
		D	B		D	B		D	B		D	B		D	B		D	B	
1	Stasiun PSDKP Belawan	176		55	55			176	55	55	83	91	91				83	91	91
2	Satwas PSDKP Rokan Hilir (Bagan Siapiapi)				6	8	8	6	8	8				10	16	16	10	16	16
3	Kabupaten Bengkalis				30	30	30	30	30	30				21	21	21	21	21	21
4	Kabupaten Kepulauan Meranti				4	3	3	4	3	3				3	2	2	3	2	2
5	Kabupaten Rokan Hilir (PANIPAHAN)				16	16	16	16	16	16				14	14	14	14	14	14
6	Wilayah Kerja PSDKP Kota Dumai				15	19	19	15	19	19				19	22	22	19	22	22
7	Satwas PSDKP Langsa				57	57	57	57	57	57				57	57	57	57	57	57
8	Kabupaten Aceh Timur	6		1	204	230	230	210	231	231	2	2	2	254	195	195	256	197	197
9	Kota Lhokseumawe				159	159	159	159	159	159				120	120	120	120	120	120
10	Kabupaten Bireuen (PEUDADA)				14	14	14	14	14	14				38	38	38	38	38	38
11	Kabupaten Aceh Utara (Kreung Mane)				42	42	42	42	42	42				48	48	48	48	48	48
12	Kabupaten Pidie				55	55	55	55	55	55				34	34	34	34	34	34
13	Kabupaten Pidie Jaya							-	-	-							-	-	-
14	Satwas PSDKP Asahan	7	7	7	136	170	170	143	177	177	2	32	32	296	416	416	298	448	448
15	Kabupaten Batu Bara							-	-	-							-	-	-
	Jumlah	189	63	63	738	803	803	927	866	866	87	125	125	914	983	983	1.001	1.108	1.108

No	UPT/Satker/Pos PSDKP	MARET									APRIL									MEI								
		E - PIT			NON PIT			JUMLAH			E - PIT			NON PIT			JUMLAH			E - PIT			NON PIT			JUMLAH		
		HPK		SLO	HPK		SLO	HPK		SLO	HPK		SLO	HPK		SLO	HPK		SLO	HPK		SLO	HPK		SLO	HPK		SLO
		D	B		D	B		D	B		D	B		D	B		D	B		D	B		D	B				
1	Stasiun PSDKP Belawan	81	83	83				81	83	83	395	339	339				395	339	339	195	231	231				195	231	231
2	Satwas PSDKP Rokan Hilir (Bagan Siapiapi)				6	6	6	6	6	6				5	11	11	5	11	11				10	18	18	10	18	18
3	Kabupaten Bengkalis				25	25	25	25	25	25				19	19	19	19	19	19				20	20	20	20	20	20
4	Kabupaten Kepulauan Meranti				4	5	5	4	5	5				2	3	3	2	3	3				3	4	4	3	4	4
5	Kabupaten Rokan Hilir (PANIPAHAN)				18	18	18	18	18	18				10	10	10	10	10	10				19	19	19	19	19	19
6	Wilayah Kerja PSDKP Kota Dumai				17	18	18	17	18	18				20	19	19	20	19	19				16	19	19	16	19	19
7	Satwas PSDKP Langsa				62	62	62	62	62	62				62	62	62	62	62	62				82	82	82	82	82	82
8	Kabupaten Aceh Timur	2	2	2	227	263	263	229	265	265	1	1	1	245	326	326	246	327	327	9	15	15	296	306	306	305	321	321
9	Kota Lhokseumawe				150	152	152	150	152	152				173	178	173	173	178	173				230	231	227	230	231	227
10	Kabupaten Bireuen (PEUDADA)				31	31	31	31	31	31				42	42	42	42	42	42				60	60	60	60	60	60
11	Kabupaten Aceh Utara (Kreung Mane)				73	73	73	73	73	73				74	74	74	74	74	74				93	93	93	93	93	93
12	Kabupaten Pidie							-	-	-				68	68	68	68	68	68				86	86	86	86	86	86
13	Kabupaten Pidie Jaya							-	-	-							-	-	-							-	-	-
14	Satwas PSDKP Asahan	7	28	28	520	421	421	527	449	449	16	40	39	453	606	606	469	646	645	31	34	32	779	631	631	810	665	663
15	Kabupaten Batu Bara							-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Jumlah	90	113	113	1.133	1.074	1.074	1.223	1.187	1.187	412	380	379	1.173	1.418	1.413	1.585	1.798	1.792	235	280	278	1.694	1.569	1.565	1.929	1.849	1.843

No	UPT/Satker/Pos PSDKP	JUNI									JULI								
		E - PIT			NON PIT			JUMLAH			E - PIT			NON PIT			JUMLAH		
		HPK		SLO	HPK		SLO	HPK		SLO	HPK		SLO	HPK		SLO	HPK		SLO
		D	B		D	B		D	B		D	B		D	B		D	B	
1	Stasiun PSDKP Belawan	276	278	278				276	278	278	327	339	339				327	339	339
2	Satwas PSDKP Rokan Hilir (Bagan Siapiapi)				14	16	16	14	16	16				16	17	17	16	17	17
3	Kabupaten Bengkalis				24	24	24	24	24	24				34	34	34	34	34	34
4	Kabupaten Kepulauan Meranti				3	4	4	3	4	4	9	10	10	3	4	4	12	14	14
5	Kabupaten Rokan Hilir (PANIPAHAN)				10	10	10	10	10	10				23	23	23	23	23	23
6	Wilayah Kerja PSDKP Kota Dumai				15	15	15	15	15	15				15	16	16	15	16	16
7	Satwas PSDKP Langsa				60	60	60	60	60	60				65	65	65	65	65	65
8	Kabupaten Aceh Timur	15	13	13	266	289	289	281	302	302	31	41	41	270	270	270	301	311	311
9	Kota Lhokseumawe				143	145	142	143	145	142				185	185	182	185	185	182
10	Kabupaten Bireuen (PEUDADA)				37	37	37	37	37	37				35	35	35	35	35	35
11	Kabupaten Aceh Utara (Kreung Mane)				58	58	58	58	58	58				80	80	80	68	68	68
12	Kabupaten Pidie				51	51	51	51	51	51				68	68	68	68	68	68
13	Kabupaten Pidie Jaya							-	-	-							-	-	-
14	Satwas PSDKP Asahan	38	54	52	637	624	624	675	678	676	39	33	32	664	678	678	703	711	710
15	Kabupaten Batu Bara	-	-	-	-	-	-	-	-	-							-	-	-
	Jumlah	329	345	343	1.318	1.333	1.330	1.647	1.678	1.673	406	423	422	1.458	1.475	1.472	1.852	1.886	1.882

No	UPT/Satker/Pos PSDKP	AGUSTUS									SEPTEMBER									OKTOBER								
		E - PIT			NON PIT			JUMLAH			E - PIT			NON PIT			JUMLAH			E - PIT			NON PIT			JUMLAH		
		HPK		SLO	HPK		SLO	HPK		SLO	HPK		SLO	HPK		SLO	HPK		SLO	HPK		SLO	HPK		SLO	HPK		SLO
		D	B		D	B		D	B		D	B		D	B		D	B		D	B		D	B		D	B	
1	Stasiun PSDKP Belawan	321	325	325				321	325	325	314	342	342				314	342	342	331	324	324				331	324	324
2	Satwas PSDKP Rokan Hilir (Bagan Siapiapi)				23	16	16	23	16	16				19	25	25	19	25	25				20	33	33	20	33	33
3	Kabupaten Bengkalis				30	30	30	30	30	30				22	22	22	22	22	22				27	27	27	27	27	27
4	Kabupaten Kepulauan Meranti				2	2	2	2	2	2				3	3	3	3	3	3				5	5	5	5	5	5
5	Kabupaten Rokan Hilir (PANIPAHAN)				15	15	15	15	15	15				41	41	41	41	41	41				7	7	7	7	7	7
6	Wilayah Kerja PSDKP Kota Dumai				19	20	20	19	20	20				19	24	24	19	24	24				11	21	21	11	21	21
7	Satwas PSDKP Langsa				69	69	69	69	69	69				69	69	69	69	69	69				69	69	69	69	69	69
8	Kabupaten Aceh Timur	55	55	55	233	239	239	288	294	294	41	41	41	249	264	264	290	305	305	45	44	44	197	203	203	242	247	247
9	Kota Lhokseumawe				209	209	206	209	209	206				175	175	175	175	175	175				179	179	179	179	179	179
10	Kabupaten Bireuen (PEUDADA)				63	63	63	63	63	63				69	69	69	69	69	69				102	102	102	102	102	102
11	Kabupaten Aceh Utara (Kreung Mane)				62	62	62	62	62	62				69	69	69	69	69	69				82	82	82	82	82	82
12	Kabupaten Pidie				91	91	91	91	91	91				65	65	65	65	65	65							-	-	-
13	Kabupaten Pidie Jaya							-	-	-							-	-	-							-	-	-
14	Satwas PSDKP Asahan	186	288	280	4.199	4.277	4.277	4.385	4.565	4.557	54	59	57	722	960	960	776	1.019	1.017	60	69	66	716	706	706	776	775	772
15	Kabupaten Batu Bara							-	-	-							-	-	-							-	-	-
	Jumlah	562	668	660	5.015	5.093	5.090	5.577	5.761	5.750	409	442	440	1.522	1.786	1.786	1.931	2.228	2.226	436	437	434	1.415	1.434	1.434	1.851	1.871	1.868

No	UPT/Satker/Pos PSDKP	NOVEMBER									DESEMBER									2024								
		E - PIT			NON PIT			JUMLAH			E - PIT			NON PIT			JUMLAH			E - PIT			NON PIT			JUMLAH		
		HPK		SLO	HPK		SLO	HPK		SLO	HPK		SLO	HPK		SLO	HPK		SLO	HPK		SLO	HPK		SLO	HPK		SLO
		D	B		D	B		D	B		D	B		D	B		D	B		D	B		D	B				
1	Stasiun PSDKP Belawan	304	298	298	-	-	-	304	298	298	299	282	282	-	-	-	299	282	282	3.102	2.987	2.987	-	-	-	3.102	2.987	2.987
2	Satwas PSDKP Rokan Hilir (Bagan Sapiapi)				10	7	7	10	7	7				11	18	18	11	18	18	-	-	-	150	191	191	150	191	191
3	Kabupaten Bengkalis				31	31	31	31	31	31				31	31	31	31	31	31	-	-	-	314	314	314	314	314	314
4	Kabupaten Kepulauan Meranti				2	3	3	2	3	3				5	5	5	5	5	5	9	10	10	39	43	43	48	53	53
5	Kabupaten Rokan Hilir (PANIPAHAN)				26	26	26	26	26	26				15	15	15	15	15	15	-	-	-	214	214	214	214	214	214
6	Wilayah Kerja PSDKP Kota Dumai				17	19	19	17	19	19				16	20	20	16	20	20	-	-	-	199	232	232	199	232	232
7	Satwas PSDKP Langsa				47	47	47	47	47	47				38	38	38	38	38	38	-	-	-	737	737	737	737	737	737
8	Kabupaten Aceh Timur	24	26	26	167	151	151	191	177	177	5	6	6	96	129	129	101	135	135	236	247	247	2.704	2.865	2.865	2.940	3.112	3.112
9	Kota Lhokseumawe				136	136	136	136	136	136				103	103	102	103	103	102	-	-	-	1.962	1.972	1.953	1.962	1.972	1.953
10	Kabupaten Bireuen (PEUDADA)				50	50	50	50	50	50							-	-	-	-	-	-	586	586	586	541	541	541
11	Kabupaten Aceh Utara (Kreung Mane)				51	51	51	51	51	51				18	18	18	18	18	18	-	-	-	738	738	738	738	738	738
12	Kabupaten Pidie							-	-	-							-	-	-	-	-	-	518	518	518	518	518	518
13	Kabupaten Pidie Jaya							-	-	-							-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14	Satwas PSDKP Asahan	49	51	49	416	431	431	465	482	480	53	10	7	-	-	-	53	10	7	542	705	681	9.538	9.920	9.920	10.080	10.625	10.601
15	Kabupaten Batu Bara	-	-	-	-	-	-	-	-	-							-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Jumlah	377	375	373	953	952	952	1.330	1.327	1.325	357	298	295	333	377	376	690	675	671	3.889	3.949	3.925	17.699	18.330	18.311	21.543	22.234	22.191

Lampiran 7.2. REKAP HASIL PENGAWASAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO LINGKUP STASIUN PSDKP BELAWAN

No	UPT PSDKP	Tanggal Pemeriksaan	Nama Pengawas Perikanan	Nama Pelaku Usaha (sesuai dengan data NIB)	Nama Perusahaan (Diisi jika usaha berbentuk korporasi/usaha berbadan hukum, jika usaha berbentuk perseorangan mohon cantumkan tanda (-))	NIB Jika usaha tidak memiliki izin, maka berikan tanda (-)	Nomor Kode Proyek	Lokasi Usaha (Nama jalan, RT/RW, Desa/Kelurahan, Kecamatan)	Status Penanaman Modal (PMA/ PMDN)	Risiko (Menengah rendah, Menengah tinggi, Tinggi)	Kode KBLI	Nama KBLI
1	Stasiun PSDKP Belawan	28 April 2025	Abul Hayyi Almufrodi Rina Puspa Sari	PT. GOLDEN SEAFOOD INDONESIA	PT. GOLDEN SEAFOOD INDONESIA	1802220041127	202206-2615-3041-2545-072	Jalan Pinus, Kota Binjai, Sumatera Utara	PMA		10293	Industri Pembekuan Biota Air Lainnya
2	Stasiun PSDKP Belawan	24 Juni 2025	Zulkarnain Nasution Zahra Rasyid Retno Adiarti	PT.AQUAFARM NUSANTARA	PT.AQUAFARM NUSANTARA	8120015280138	202102-2613-3653-6946-535	Dusun Dukuh, Serdang Bedagai, Sumatera Utara	PMA		10213	Industri Pembekuan Ikan
3	Stasiun PSDKP Belawan	26 Juni 2026	Sirman Rajagukguk Fitri Zuliana Muhammad fathir	PT. ZAHID IMRAN INTERNASIONAL	PT. ZAHID IMRAN INTERNASIONAL	1808240030771	202411-2109-5902-8497-964	Jl. Sultan Serdang, Perumahan Serdang Indah, Gang Duku Nomor 41	PMA		46206	Perdagangan Besar Hasil Perikanan
4	Stasiun PSDKP Belawan	7 Agustus 2025	Inggrika R. Kaban Didit Aditya	TJOAN TJAI ALIAS MANAN	TJOAN TJAI ALIAS MANAN	1289000650686	202312-0909-2726-8643-797	DUSUN I JALAN LETDA SUJONO NO.171, Percut Sei Tuan	PMDN	Tinggi	03111	Penangkapan Pisces/Ikan Bersirip Di Laut
5	Stasiun PSDKP Belawan	27 Mare'14 Agustus 2025	Abdullah Ali Hakim Asmaul Husna	JONNER SIMANGUNSONG	JONNER SIMANGUNSONG	0811210044143	202401-1609-4527-6723-034	Jl. Titi Pahlawan No.28 Medan Marelan	PMDN	Tinggi	03111	Penangkapan Pisces/ Ikan Bersirip Dilaut
6	Stasiun PSDKP Belawan	17 September 2026	Hartoto Perkasa Sembiring	TAN PENG HUI	TAN PENG HUI	9120401741987	202501-2110-5756-5221-233	Jl. JEND. SUDIRMAN NO. 64 LK. IV, TBA	PMDN	Tinggi	03111	Penangkapan Pisces/ Ikan Bersirip Dilaut
7	Stasiun PSDKP Belawan	18 September 2026	Imran Rosyadi Benardo Nababan	FFLORENCE ANGELIN	FFLORENCE ANGELIN	1298000322634	202404-2412-5207-3353-212	JLN. SISINGAMANGARAJA NO. 61 LK. II, TBA	PMDN	Tinggi	03111	Penangkapan Pisces/ Ikan Bersirip Dilaut

Lampiran 7.3. REKAP HASIL PENGAWASAN DISTRIBUSI IMPORTASI LINGKUP STASIUN PSDKP BELAWAN

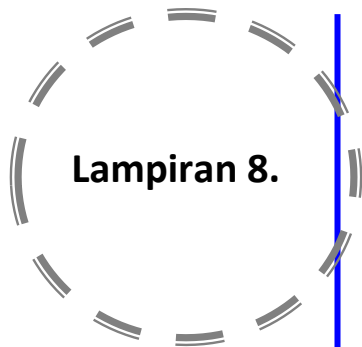
Unit Kerja	Tanggal Pelaksanaan Pengawasan	Nama Pengawas Perikanan	Nomor Kontak Pengawas Perikanan	Jenis Komoditas Perikanan yang Diimpor	Nama Perusahaan Importir	NIB Perusahaan Importir	Lokasi Perusahaan Importir	Kab./Kota Lokasi Perusahaan Provinsi Lokasi Perusahaan Importir	Analisis/Rekomendasi Hasil Pengawasan	Hasil Pengawasan (Kesesuaian terhadap Ketentuan)	Kepatuhan Pelaku Usaha
Stasiun PSDKP Belawan	20 Mei 2025	Adhi Kurniawan	081394530069	Hasil Perikanan	PT ARTHA MAJU GEMILANG	8120009810673	Jl. Pelabuhan Perikanan Gabien Gd-4 Lingk XI, Kota Medan	Kota Medan Sumatera Utara	Ditemukan bahwa distribusi impor tidak sesuai peruntukkan	Tidak Sesuai	Sanksi
Stasiun PSDKP Belawan	18 November 2025	ADHI KURNIAWAN	081394530069	Hasil Perikanan	CV BAHAGIA	8120009793819	Jl. GARHON NO 999 KOTA MEDAN, PROP. SUMATERA UTARA	KOTA MEDAN Sumatera Utara	TERDAPAT INDIKASI KETIDAKSISUALAN PERUNTUKKAN DISTRIBUSI	Tidak Sesuai	Sanksi

Lampiran 7.4. REKAP HASIL PENGAWASAN PEMANFAATAN JENIS IKAN YANG DILINDUNGI LINGKUP STASIUN PSDKP BELAWAN

Nama Unit Kerja	Tanggal Pengawasan	Nama Pengawas Perikanan	Nama Perusahaan/Perorangan/Provinsi Lokasi Kegiatan	Kabupaten/Kota	Nama Pelaku Usaha/Penasan Jenis Pengamatan	Dugaan Pelanggaran	Dugaan Pelanggaran / Rekomendasi
Stasiun PSDKP Belawan	30/09/2025	SIRMAN RAJAGUKGUK FITRI ZULIANA	CV. CAHAYA SEJAHTER	Sumatera Utara	MEDAN	HENDRA	Tidak Ada - -
Stasiun PSDKP Belawan	04/12/2025	Indraprasta C.T. Hendri Hamzah Zulkadrihani Abdullah Ali Hakim Nasution	PT. Sukses Arwana Sumarindo	Riau	Pekanbaru	Yudhani Prasetyo	Langsung rutin Tidak Ada - -
Stasiun PSDKP Belawan	04/12/2025	Indraprasta C.T. Hendri Hamzah Zulkadrihani Abdullah Ali Hakim Nasution	CV. Sumber Lestari Alam	Riau	Pekanbaru	Salim	Langsung rutin Ada Tidak memiliki SIPJ Pengambilan Keterangan Pelaku Usaha
Stasiun PSDKP Belawan	10/12/2025	Hendri Hamzah Zulkadrihani Fitri Zuliana Zahra rasyid Rina Puspa Sari Muhammad Fathir	PT. Salmah Arowana Lestari	Riau	Pekanbaru	Daniel Kristanto	Langsung rutin Tidak Ada -
Stasiun PSDKP Belawan	10/12/2025	Hendri Hamzah Zulkadrihani Fitri Zuliana Zahra rasyid Rina Puspa Sari Muhammad Fathir	CV. Riau Arwana	Riau	Pekanbaru	T. Rusli Ahmad	Langsung rutin Tidak Ada -

Lampiran 7.5. REKAP HASIL PENGAWASAN INSIDENTAL LINGKUP STASIUN PSDKP BELAWAN

UPT yang melakukan pemeriksaan	Nama Pengawas Perikanan	Tanggal Pengawasan	Nomor Kode Proyek	Nama Perusahaan/Perorangan	Nama Pelaku Usaha/Penanggungjawab	NIB	NPWP	Skala Usaha	Status Pemamanan Modal	Lokasi Kantor Pusat	Lokasi Proyek	Provinsi	Kabupaten/Kota	Titik Koordinat Lokasi Usaha	Subsektor Pengawasan	Kode KBL	Uraian KHL	Risiko	Rekomendasi
Stasiun PSDKP Belawan	ADRI KURNIAWAN, NUR BAITY ALIFYANI	20/02/2025 -		PT SEAFOOD SAMUDERA PACIFIC	ROOSNALLA	8.13011E+12 -		Resar	PMA	Jl. GABION NO. 15, KOTA MEDAN, SUMATERA UTARA	Jl. GABION NO. 15, KOTA MEDAN, SUMATERA UTARA	Sumatera Utara	KOTA MEDAN	3,777091 , 98,709458	Pengolahan Hasil Perikanan		10213 Industri Pembekuan Ikan	Menengah-Tinggi	Telah memenuhi persyaratan pertizinan berusaha dan pemenuhan standar pelaksanaan kegiatan usaha
Stasiun PSDKP Belawan	Ankari & M. Fahrul Risa	19/05/2025 -	202308-2417-0440-6843-232	NASABE MAKMUR BERSAMA	RADIANTO	1611210045969	83.099.541.4-105.000	Menengah	PMEN	Jl. PROFESSOR A. MAJID ISRAHIM NO. 48 LANGSA	Alue Dua, Kec. Langsa Baro, Kota Langsa, Aceh 24452 Kab. Aceh Timur Aceh	Aceh	Kota Langsa	4,3290N 97,5627E	Pembudidayaan Ikan	03211	Pembesaran ikan/pieces bersirip di laut	Menengah Rendah	Penerapan sanksi
Stasiun PSDKP Belawan	Zulkadrihani	16/07/2025 -		Edi Santoso	Edi Santoso	-	-	Mikro	PMEN	Kampung Tengah, Kepenghuluan Parit Aman, Kecamatan Bangko	Langsa Baro, Kota Langsa, Aceh 24452 Kab. Aceh Timur Aceh	Riau	Kabupaten Rokan Hilir	-2.195719, 100.820992	Pembudidayaan Ikan	03221	Pembesaran Ikan Air Tawar di Kolam	Menengah Rendah	Pembinaan dan Perbaikan
Stasiun PSDKP Belawan	Kelvin Ramadhan	16/07/2025 -		Tri Mawanto	Tri Mawanto	-	-	Mikro	PMEN	Kampung Tengah, Kepenghuluan Parit Aman, Kecamatan Bangko	Langsa Baro, Kota Langsa, Aceh 24452 Kab. Aceh Timur Aceh	Riau	Kabupaten Rokan Hilir	-2.195237, 100.820948	Pembudidayaan Ikan	03221	Pembesaran Ikan Air Tawar di Kolam	Menengah Rendah	Pembinaan dan Perbaikan
Stasiun PSDKP Belawan	Muhammad Hamdani	25/05/2025 -		-	H. Iskandar	-	-	Mikro	PMEN	-	Desa Sungai Pauh Puka, Kecamatan Langsa Baro	Aceh	Kota Langsa	4,4970768,97,5633227	Pembudidayaan Ikan	03215	Pembesaran Pucuk/Ikan Bersirip Air Payau	Menengah Rendah	Pembinaan dan Perbaikan



Pengawasan Sumber Daya Kelautan Tahun 2025

8.1. Pengawasan Pencemaran Perairan

NO	UNIT KERJA PSDKP	WAKTU	LOKASI	URAIAN HASIL	KETERANGAN
1.	Stasiun PSDKP Belawan	7 Juli 2025	PT. ANUGERAH ALAM INDUSTRI	- PT. ANUGERAH ALAM INDUSTRI, Jl. Jala IV Nomor 32, Lingk. III, Kelurahan Rengas Pulau, Kecamatan Medan Marelan, Kota Medan; - Perusahaan ini termasuk dalam kategori UPI yang bergerak dalam bidang unit pengolahan ikan yang melakukan kegiatan pengolahan ikan & udang; - Perusahaan ini memiliki NIB nomor 91202042000489; - Perusahaan ini memiliki Izin PKKPR, IMB, UKL/UPL;	Unit pengolahan Ikan pada saat Pemeriksaan tidak ditemukan adanya indikasi Pelanggaran
2		8 Juli 2025	PT. Suryawindu Pertiwi	- PT. Seafood Samudera Pasific (SSP), Jl. Titi, Pahlawan No.38 Desa/Kelurahan Rengas Pulau, Kec.Medan Marelan, Kota Medan, Prov. Sumatera Utara; - Perusahaan ini termasuk dalam kategori UPI yang bergerak dalam bidang unit pengolahan ikan yang melakukan kegiatan pengolahan ikan & udang; - Perusahaan ini memiliki NIB nomor 8120002962402; - PKKPR, IMB, UKL/UPL, Izin Lingkungan	Unit pengolahan Ikan pada saat Pemeriksaan tidak ditemukan adanya indikasi Pelanggaran

8.2. Pengawasan Pemanfaatan Ruang Laut

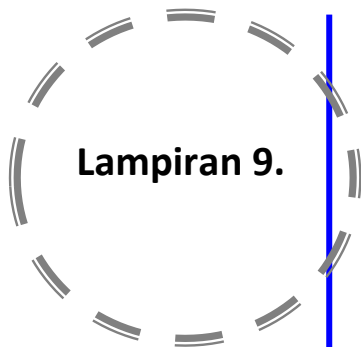
NO	UNIT KERJA PSDKP	WAKTU	LOKASI	URAIAN HASIL	KETERANGAN
1	Stasiun PSDKP Belawan	18 Maret 2025	Pengawasan Pemanfaatan Ruang Laut SRI HARTATI	- Kegiatan dilaksanakan pada Tanggal 18 Maret 2025 di Usaha Ibu Sri Hartati, lokasi KABUPATEN SERDANG BEDAGAI PROVINSI SUMATERA UTARA;	INSIDENTAL
				- Akan dilakukan pemanggilan dan permintaan keterangan terhadap Ibu Sri Hartati untuk memperoleh informasi lebih lanjut, serta agar lebih dapat memahami alur proses kejadian dan tahapan pelaksanaannya, sehingga dalam proses supervisi maupun ekspos selanjutnya, dapat memberikan informasi yang jelas dan berstruktur.	
2	Satwas SDKP Langa	15 Mei 2025	Pengawasan Pemanfaatan Ruang Laut BAPAK RAMLI RISYAT	- Kegiatan dilaksanakan pada Tanggal 15 Mei 2025 di Usaha Bapak Ramli Risyat, lokasi KABUPATEN KABUPATEN ACEH TIMUR	INSIDENTAL
				- Bapak Ramli Risyat tidak memiliki perizinan dasar sehingga akan dilakukan pemberhentian sementara kegiatan sebagai kewenangan POLSUS dalam mengentikan pelanggaran tertentu serta melakukan proses pengenaan sanksi administrasi sesuai PERMEN KP No 31 Tahun 2021 dan direkomendasikan agar Pelaku Usaha Ramli Risyat dapat dikenakan sanksi administrasi berupa Peringatan/teguran tertulis.	
3	Stasiun PSDKP Belawan	17 s.d 18 Juni 2025	Terminal Khusus PT. Inti Benua Perkasatama	- Tidak ditemukan adanya perubahan/pelanggaran di Bidang Pemanfaatan Ruang Laut	
				- Nomor Induk Berusaha (NIB):8120108803912	
				- Pelaku usaha telah memiliki PKKPRL Nomor : 0410241051140001 tanggal 4 Oktober 2025 seluas 0,01 Ha, Untuk kegiatan penampungan dan penyaluran air baku	
				- Pelaporan tahunan PKKPRL belum dilakukan karna masih memiliki waktu hingga 3	
4	Stasiun PSDKP Belawan	19 Juni 2025	Terminal Khusus PT. Agro Murni	- Nomor Induk Berusaha (NIB):8120015272905	
				- Agar pelaporan kewajiban berikutnya dilakukan mengikuti tanggal PKKPRL yang lama, yaitu sebelum 28 Februari 2023;	
				- Penilaian pemenuhan kewajiban akan dilakukan dengan Ditjen Penataan Ruang Laut.	
5	Stasiun PSDKP Belawan	10 Juli 2025	Submarine Pipeline PT. Pertamina Parta Niaga	- PT. Pertamina Patra Niaga Lhokseumawe Melakukan Pendaftaran sistem E-Pipakabel untuk mekanisme penyelenggaraan pendiri atau penempatan bangunan	
				- dan instalasi di laut, sistem ini merupakan penjabaran dan implementasi dari keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 42 tahun 2022 tentang mekanisme penyelenggaraan pendirian dan/atau penempatan bangunan dan instalasi di laut.	
6	Stasiun PSDKP Belawan	17 Juli 2025	Terminal Khusus PT. Semen Padang	- NIB 8120200840621, PKKPRL No 01022410511100013, PKKPRL No 01022410511100014	
				- PKKPRL No 21112210511100006	
				- PKKPRL No 17102410511100003	
				- Izin Pengelolaan dan Operasional TUKS, PB-UMKU, PKKPRL, KLHK	
				- Kegiatan dilaksanakan pada Tanggal 17 Juli 2025 di lokasi PT. Semen Padang di jalan Cut Nyak Dien, Kel. Laibuk Gaung, Sungai Sembilan, Kota Dumai, Riau dengan koordinat 1.728945N - 101.391283E.	
				- PT. Semen Padang Memiliki NIB Nomor 8120504990821 dan di terbitkan pada tanggal 2 September 2019 dengan KBLI 82820 - Aktivitas Pengepakan dan merupakan perusahaan dengan kategori Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan Klasifikasi Resiko Tinggi;	
7	Stasiun PSDKP Belawan	23 Juli 2025	Terminal Khusus PT. PLN Indonesia Power	- PT. Semen Padang Telah memiliki Dokumen Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (PKKPRL) Nomor 17102410511100003, dan di terbitkan	
				- Adapun PKKPRL dipergunakan untuk bangunan Terminal Khusus (TERSUS) berupa dermaga;	
				- Berdasarkan hasil pemeriksaan dilapangan, seluruh bangunan fisik dermaga TERSUS milik PT. Semen Padang benar dalam koordinat PKKPRL;	
				- Agar Semen Padang dapat melakukan penyampaian Laporan Tahunan secara tertib dan tepat waktu	
				- Kegiatan dilaksanakan pada Tanggal 23 Juli 2025 di lokasi PT. PLN Indonesia Power di jalan Desa Tanjung Pasir, Kec. Pangkalan Susu, Kab. Langkat, Sumatera Utara;	
8	Stasiun PSDKP Belawan	13 November 2025	Pemanfaatan Ruang Laut PT. Perkebunan Sungai Wang	- PT. PLN Indonesia Power memiliki (NIB) 8120205840413 Dokumen Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (PKKPRL) Nomor 18032410511200058 Kelayakan Lingkungan Hidup Kegiatan Pembangkit Listrik Tenaga Uap Izin Operasional Tersus (IUPPLTU);	INSIDENTAL
				- Agar PT PLN Indonesia Power dapat melakukan penyampaian Laporan Tahunan secara tertib dan tepat waktu	
				- Kegiatan dilaksanakan pada Tanggal 13 November 2025 di lokasi PT. PT. Perkebunan Sungai Wang di jalan KABUPATEN DELI SERDANG PROVINSI SUMATERA UTARA;	
8	Stasiun PSDKP Belawan	13 November 2025	Pemanfaatan Ruang Laut PT. Perkebunan Sungai Wang	- Agar PT. Perkebunan Sungai Wang dapat bekerjasama dan kooperatif dalam pengambilan keterangan/ klarifikasi yang akan segera dilaksanakan.	INSIDENTAL

8.3. Pengawasan Produk dan Jasa Kelautan

NO	UNIT KERJA PEDK	WAKTU	LOKASI	URAIAN HASIL	KETERANGAN
1	Stasiun PEDK Belawan	8 Mei 2028	PT. SARI DUMAI SEJATI	- Kegiatan pengawasan dilaksanakan pada tanggal 8 Mei 2028 di PT. Sari Dumi Sejati yang berada pada Jalan Raya Lubuk Gunung, Kelurahan Lubuk Gunung, Kecamatan Sungai Sembilan, Kota Dumai, Provinsi Riau - PT. Sari Dumi Sejati bergerak dalam bidang Industri Pemisahan/Tahminasi Minyak Mentah Kelapa Sawit dan Minyak Mentah Inti Kelapa Sawit - PT. SARI DUMAI SEJATI telah memiliki NIB 812010962403; - PT Sari Dumi Sejati diduga melakukan kegiatan pemanfaatan ALSE untuk kegiatan pendinginan turbin serta desainasi air laut, tanpa memiliki perizinan berusaha dari Pemerintah Indonesia. Adapun kewajiban memiliki ALSE dapat dibenarkan karena debit air laut yang dipergunakan adalah lebih dari 50 liter/detik. Selanjutnya akan dilakukan pendalaman informasi dan diproses berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 31 Tahun 2021.	
2		8 Mei 2028	PT. SEMESTA ALAM PERMAI	- Kegiatan pengawasan ini dilaksanakan pada tanggal 8 Mei 2028 di Jalan Raya Lubuk Gunung, Desa Kelurahan Lubuk Gunung, Kecamatan Sungai Sembilan, Kota Dumai, Provinsi Riau; - PT. Semesta Alam Permai bergerak dalam bidang Multibusaha mayoritas bergerak di bidang minyak kelapa sawit (termasuk penampungan dan penyutiran air baku); - PT. SEMESTA ALAM PERMAI memiliki dokumen perizinan berusaha yaitu Nomor Induk Berusaha (NIB): 8120116032182; - kegiatan pemanfaatan ALSE untuk kegiatan desainasi air laut, tanpa memiliki perizinan berusaha dari Pemerintah Indonesia. Adapun kewajiban memiliki ALSE dapat dibenarkan karena debit air laut yang dipergunakan adalah lebih dari 50 liter/detik. Selanjutnya akan dilakukan pendalaman informasi dan diproses berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 31 Tahun 2021;	
3		17 Juni 2028	PT. Inti Benua Perkastama (IBP)	- Kegiatan pengawasan ALSE ini dilaksanakan tanggal 17 Juni 2028 Jalan Raya Lubuk Gunung, Desa Kelurahan Lubuk Gunung, Kecamatan Sungai Sembilan, Kota Dumai, Provinsi Riau - NIB 812010803912, - PKEPRL nomor: 04102410511400001 - utas pemanfaatan ALSE dengan nomor: 812010803912002 - PT. Inti Benua Perkastama (IBP) bergerak dalam bidang Multibusaha mayoritas bergerak di bidang minyak kelapa sawit (termasuk penampungan dan penyutiran air baku) - Berdasarkan laporan bulanan pemanfaatan ALSE dari bulan Januari - Mei 2028 - (3 bulan) kuota terpakai sebesar 20,07% dari kuota tahunan. Selanjutnya, PT. IBP diharapkan dapat menyampaikan laporan rutin bulanan secara tepat waktu.	
4		16 Juli 2028	PT. Agro Murni	- Kegiatan pengawasan PT. Agro Murni wisata bahari ini dilaksanakan di Jalan Ketan Putih, Kelurahan Tanjung Penyembil, Kecamatan Sungai Sembilan, Kota Dumai Provinsi Riau - NIB 812011872905 - PKEPRL nomor: 28022210511400005 - tlm tanggungan, - tlm ALSE Nomor 8120015272950010 - PT. Agro Murni bergerak di bidang Multibusaha mayoritas bergerak di bidang Pengolahan kelapa sawit (termasuk penampungan dan penyutiran air baku sebagai usaha pendahang) - Diharapkan kedepannya pelaku usaha dapat menyelesaikan kewajibannya sebelum menjalankan usahanya seperti yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.	
5		20 Oktober 2028	PT. KIK Dumai	- Kegiatan dilaksanakan pada 20 Oktober 2028 di PT. KIK Dumai yang beralamat di Jl. Dink Lubanama, Kawasan Peltindo 1, Kelurahan Buluh Kasap, Kecamatan Dumai Timur, Kota Dumai, Provinsi Riau; - NIB 812020081144, - PKEPRL Nomor 28022210511400003, - PT. KIK Dumai bergerak di bidang Industri Kimia Dasar Organik yang bersumber dari Hasil Pertanian - juga usaha pemanfaatan ALSE PT. KIK Dumai masih berada dalam awal PKEPRL PT. Palabuhan Indonesia (Persero) cabang Dumai, dimana untuk kedua Perusahaan tersebut telah memiliki perjanjian pemanfaatan lahan yang masih berlaku dengan jangka waktu 20 tahun (Agustus 2011 s.d. Agustus 2031), sehingga PT. KIK Dumai dapat menjadikan PKEPRL PT. Palabuhan Indonesia (Persero) cabang Dumai sebagai dasar pengurusan dokumen ALSE. Namun, PT. KIK Dumai belum memiliki dokumen perizinan pemanfaatan ALSE, sehingga hal tersebut menjadi sebuah dugaan pelanggaran. Oleh karena itu, Pengawas Kelautan (Polas WPKR) Stasiun PEDK Belawan akan melakukan kegiatan pemantauan keturungan.	
6					

8.4. Pengawasan Produk dan Jasa Kelautan

NO	UNIT KERJA PIDEK	WAKTU	LOKASI	URAIAN HASIL	KETERANGAN
1	Stasiun PIDEK Belawan	8 s.d 7 Oktober 2025.	1. PT Telekomunikasi Indonesia. 2. PT Indosat Ooredoo Hutchison. 3. PT Triasmitra	- Melakukan Kegiatan Pulbakat Terkait Kegiatan Pemanfaatan ruang laut pada tanggal 4 s.d 7 Oktober 2025 di Kecamatan Pemat Cernin, Kabupaten Serdang Bedagai, Provinsi Sumatera Utara. - Berdasarkan data dari website e-sas milik Kementerian Kelautan dan Perikanan, tidak ditemukan adanya jalur kabel yang memiliki landing Point di Kabupaten Serdang Bedagai. Kondisi ini menimbulkan dugaan bahwa ketiga Perusahaan tidak memiliki izin memiliki FKKPL. Namun hal ini dapat pula terjadi karena tiga Perusahaan ini masih memiliki dokumen perizinan lama yang masih berlaku, hingga pasal 549 dalam PP 28 Tahun 2005	
5		27 S.D 28 Oktober 2025	PT SEMESTA ALAM PERMAI	- Kegiatan pengawasan ini dilaksanakan pada tanggal 8 Mei 2025 diJalan Raya Lubuk Gunung, Desa/Kelurahan Lubuk Gunung, Kecamatan Sungai Sembilan, Kota Dumai, Provinsi Riau. - PT. Semesta Alam Permai bergerak dalam bidang Multibusaha mayoritas bergerak di bidang minyak kelapa sawit (termasuk penampungan dan pengolahan air bukit). - PT. SEMESTA ALAM PERMAI memiliki dokumen perizinan berusaha yaitu Nomor Induk Berusaha (NIB) E120116035195. - kegiatan pemanfaatan ALSE untuk kegiatan desalinasi air laut, tanpa memiliki perizinan berusaha dari Pemerintah Indonesia. Adapun kewajiban memiliki ALSE dapat dihindari karena debit air laut yang dipergunakan adalah lebih dari 50 liter/detik. Selanjutnya akan dilakukan pendalaman informasi dan diproses berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 31 Tahun 2021;	
3		5 S.D 6 November 2025	Perikanan (DHP) Kabupaten Batu bara (DB)	- Kegiatan pengawasan ALSE ini dilaksanakan tanggal 8 s.d 6 November 2025 Kecamatan Tanjung Tiang, Kabupaten Batu bara, Provinsi Sumatera Utara. - Melakukan Kegiatan Pulbakat - Terkait Kegiatan Pemanfaatan Sedimentasi Laut tidak ditemukan adanya aktivitas kapal pengangkut pasir ataupun sedimen laut di perairan Tanjung Tiang, Kabupaten Batu bara, dan dokumentasi foto kapal yang digunakan teridentifikasi tidak benar.	
5		7 November 2025.	Perkebunan Sungai Wang	- Kegiatan pengawasan PT. Perkebunan Sungai Wang dilakukan pada tanggal 7 November 2025 di Desa Pematang Lintang, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Serdang Bedagai, Provinsi Sumatera Utara. - pemenuhan kepatuhan dalam ketentuan pemanfaatan ruang laut. - Tindak Lanjut yg akan dilakukan adalah melakukan pertemuan dengan Bapak Sembiring dan menjadwalkan pengawasan insidental pada areal tersebut	
6		23 s.d 25 November 2025	Kantor Badan Pengelola Migas Aceh (BPMA)	- Kegiatan dilaksanakan pada 23 s.d 25 November 2025 di Kantor Badan Pengelola Migas Aceh (BPMA) yang beralamat di Jl. Stadion H.Dimurthala No 06, Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh. - Timor, Kota Tumas, Provinsi Riau; - Pemutatan kontrak BPT Rapael Andaman B.V oleh pemerintah didasarkan dari surat dari pihak Perusahaan itu sendiri; karena dalam upaya eksplorasi, BPT Rapael Andaman B.V tidak menemukan adanya minyak bumi dalam jumlah yang signifikan; b) Tidak Kawasan FKKPL BPT Rapael Andaman B.V, tidak terdapat bangunan yang secara fisik menetap di areal tersebut; c) Area ini sedang diteliti oleh Kementerian Energi Sumber Daya Mineral, untuk mencari Kontraktor yang mampu mengelola wilayah migas tersebut;	
7		10 s.d 12 Desember 2025	kegiatan pengumpulan bahan dan keterangan perihal pemanfaatan ruang laut berupa keramba jaring apung (KJA)	- Kegiatan dilaksanakan pada 10 s.d 12 Desember 2025 di Kota Pekanbaru, Provinsi Riau; - 1. Bidang Perikanan Budidaya menyimpulkan bahwa mereka saat ini belum mengetahui secara pasti peta alokasi zona budidaya ikan di Kabupaten Kepulauan Meranti, terkait draft rancangan peraturan daerah KTA sedang tahap pengesahan; 2. Dalam dua tahun terakhir, Bidang perikanan budidaya tidak memperoleh alokasi anggaran yang cukup sehingga pembinaan kepada kelompok pembudidaya ikan sangat minim. Mereka bahkan belum mengetahui perihal kondisi pemanfaatan KJA yang terbaru dan sulit memperoleh data produksi;	



Rekap Kapal yang diperiksa Tahun 2025

Lampiran 9. Rekapitulasi Jumlah kapal yang diperiksa oleh KP Hiu 01, Hiu 08, Hiu 16, Napoleon 028 dan Dolphin 014 saat Patroli

No	Kapal Pengawas / Speed Boat	Bulan	Periksa		Dokumen		Dokumen Lengkap
			API	Jumlah	Lengkap	Tidak Lengkap	
1	KP. Hiu 01	Mei	JHIB	3	14	4	
			Pukat Labuh	7			
			Pancing Cumi	1			
			Pancing Ulur	1			
			Pukat Cincin Teri	1			
			Jaring Insang Hanyut	1			
		Juni	Trawl	1	1	1 KIA	
			Pancing Cumi	1			
		Juli	JHIB	11	13	1	
			Pukat Cincin Pelagis	3			
		September	Pukat Labuh	5	37	3	
			JHIB	9			
			Gill Net	5			
			Bubu Labuh	10			
			Kapal Pengangkut	1			
			Pukat Cincin Pelagis Kecil	5			
			Pancing Cumi	2			
			Pancing Ulur	1			
			Pukat Tarik	2			
		Oktober	Jaring Insang Hanyut	7	13	0	
			Jaring Insang Tetap	1			
			Jala Jatuh Berkapal	3			
			Kapal Pengangkut	2			
		Desember	Jaring Insang Hanyut	8	35	2 dan 1 Resque KIA	
			Jaring Insang Tetap	2			
			Kapal Pengangkut	1			
			Bottom Gillnet	1			
			Gill Net	2			
			Kapal Bantu Penangkapan	1			
			Bubu	1			
			Purse Seine	3			
			Pancing Cumi	13			
			Bouke Ami	4			
			Pukat Cincin Pelagis	1			
			Pancing Ulur	1			
2	KP. Hiu 08	Mei	pukat Cincin	2	6	2	
			JHIB	2			
			Pancing Cumi	4			
		Juli	JHIB	6	8	10	
			Pukat Cincin	2			
			Pukat Cincin Pelagis Kecil	2			
			Pukat Hanyut	1			
			Jaring Insang Hanyut	2			
			Pancing Cumi	4			
			Mini Trawl	5			
		Oktober	Jaring Insang Hanyut	3	18	0	
			Jaring Insang Tetap	3			
			PSPK	7			
			Pukat Cincin	3			
			Pukat Labuh	1			
			JHIB	1			
		Desember	Pukat Cincin Teri	5	32	5	
			Gill Net	4			
			Jaring	1			
			Botom Gilnet	1			
			Jaring Insang Tetap	1			
			Jaring Insang Hanyut	1			
			Pukat Labuh	17			
			Pukat Labuh Teri	1			
			Jala Jatuh Berkapal	2			
			Bubu	1			

No	Kapal Pengawas / Speed Boat	Bulan	Periksa		Dokumen		Dokumen Lengkap
			API	Jumlah	Lengkap	Tidak Lengkap	
3	KP. Hiu 016	MEI	JHIB	11	21	7	
			PCPK-SK	6			
			JARING INSANG TETAP	1			
			JARING INSANG HANYUT	2			
			PANCING RAWE	1			
			PANCING CUMI	2			
			PANCING ULUR	1			
			PUKAT TRAWL	2			
			PCT-SK	2			
			PUKAT CINCIN	1			
		JUNI	JHIB	7	7	0	
			PENGANGKUT DAN PENGUMPUL IKAN	1			
		JULI	GILL NET	4	9	0	
			JARING INSANG HANYUT	4			
			JARING INSANG TETAP	1			
		AGUSTUS	GILL NET	3	10	0	
			JHIB	6			
			PCPK-SK	1			
		OKTOBER	PANCING CUMI	5	57	1	
			JALA JATUH BERKAPAL	40			
			JARING INSANG HANYUT	7			
			JHIB	2			
			JARING TARIK BERKANTONG	2			
		NOVEMBER	JARING INSANG TETAP	2	5	0	
			JARING INSANG HANYUT	4			
			JARING INSANG TETAP	1			
		DESEMBER	JHIB	18	36	4	
			JARING INSANG HANYUT	6			
			PANCING CUMI MEKANIS	1			
			PANCING CUMI	10			
			BOUKE AMI	3			
			PCPK-SK	1			
			GENERAL CARGO	1			
4	Napoleon 028	Juni	JHIB	6	9	0	
			Pukat Cincin Teri	2			
			Purse Seine	1			
		Juli	JHIB	2	17	0	
			Pukat Cincin Teri	13			
			Purse Seine	2			
		November	JHIB	11	27	12	
			Pukat Cincin Teri	19			
			PSPK	3			
			Purse Seine	1			
			Bouke Ami	2			
			LBSN	1			
			Pertrawl	2			
		Desember	JHIB	6	10	0	
			Pukat Cincin Teri	1			
			Pukat cincin pelagis	2			
			Pancing Cumi	1			